



RENCANA KERJA TAHUN 2019

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Kasih sayang-Nya dalam membimbing dan memberi kekuatan sehingga dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2019 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung ini dapat disusun dan diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Perencanaan merupakan proses untuk menentukan apa yang hendak dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Proses perencanaan dilakukan dengan menguji berbagai cara pencapaian serta mengkaji berbagai ketidakpastian, mengukur kapasitas yang ada untuk kemudian memilih arah yang terbaik serta langkah-langkah untuk mencapainya. Salah satu perencanaan yang dilakukan oleh Kecamatan Buahbatu setiap tahunnya adalah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dan serta penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu tidak terlepas dari Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Bandung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor 903/2769 – Bappelitbang dan 900/1432 – DPRD tanggal 1 Agustus 2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kecamatan Buahbatu yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaannya, sekaligus sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu dalam penyusunannya dilakukan melalui 4(empat) pendekatan yaitu (1) Pendekatan Teknokratis, (2) Pendekatan Partisipatif dan Bottom - Up, (3) Pendekatan Top – Down, dan (4) Pendekatan Politis, sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat. Untuk lebih mengedepankan aspek sinkronisasi, penyusunan Rencana Kerja diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional, pembangunan provinsi dan pembangunan daerah.

RKPD Kecamatan Buahbatu tahun 2019 merupakan rencana tahunan, dimana dokumen Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu tahun 2018 – 2023 telah masuk tahun kedua. Oleh karena itu, salah satu untuk menyelesaikan masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD maka akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD berikutnya.

Pada kesempatan baik ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam penyelesaian dokumen ini, jajaran aparat di lingkungan Pemerintahan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dan masyarakat yang telah mendukung penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2019.

Semoga apa yang disusun dalam dokumen perencanaan ini dapat dijadikan pedoman dan memberi manfaat bagi pelaksanaan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Buahbatu khususnya dan masyarakat Kota Bandung pada umumnya.

Billahi Taufik Wal Hidayah.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandung, Juli 2019

Camat Buahbatu



Drs. DENNY SANY, M.Si
NIP. 19650810 198603 1 024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	8
1.3. Maksud dan Tujuan	13
1.4. Sistematika Penulisan	14
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUAHBATU TAHUN 2018	19
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buahbatu Tahun2018 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Buahbatu	19
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Buahbatu	
2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	47
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	73
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	76
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	76
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	98
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	101
BAB V PENUTUP	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah (Kecamatan Buahbatu) s/d Tahun 2018.....	19
Tabel 2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	34
Tabel 3 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020 Kecamatan Buahbatu Kota Bandung	62
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2020 Kota Bandung	
Tabel 3.5 Isu-isu Strategis	96
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021 Kota Bandung	104

DAFTAR GAMBAR

1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD	3
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang wajib disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 3 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan secara terpadu sesuai dengan kewenangannya.

RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang dalam penyusunannya mengacu juga pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi (RKPD Provinsi) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Secara substantif RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, serta prakiraan maju

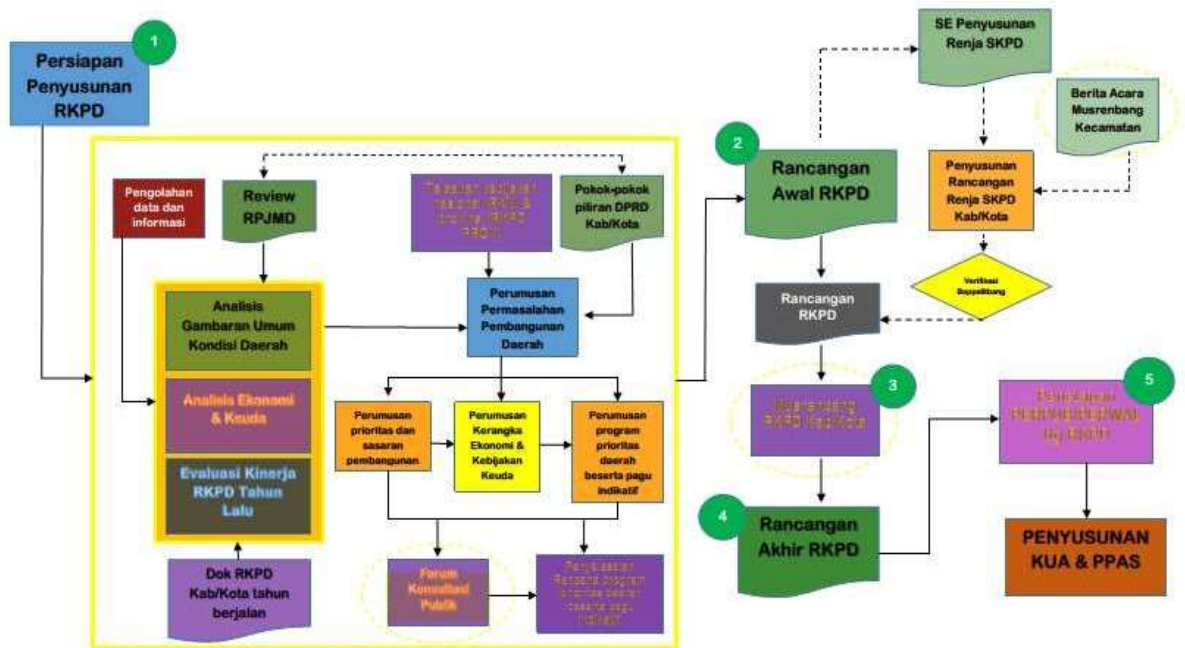
untuk tahun berikutnya. Selain hal tersebut, RKPD juga memuat arah kebijakan pembangunan daerah selama satu tahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen pemerintah daerah yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) SKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan dan kegagalan kinerja SKPD dalam kurun 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dilakukan secara simultan bersamaan waktu dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2018-2023. RKPD Kecamatan Buahbatu disusun melalui tahapan persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD, dengan siklus yang dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.1

Tahapan dan Tata Cara Penyusunan RKPD



Secara garis besar tahapan dan tata cara penyusunan RKPD sebagaimana tergambar dalam gambar 1.1 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RKPD

Pada tahap persiapan ini serangkaian aktivitas yang dilakukan meliputi :

- a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. Orientasi mengenai RKPD;
- c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan

- d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal RKPD
Penyusunan rancangan awal RKPD melalui tahapan kegiatan yang merupakan suatu rangkaian proses yang berurutan, yaitu :
 - a. Tahapan penyusunan rancangan awal RKPD, mencakup :
 - 1) Analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - 2) Analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - 3) Analisis kapasitas riil keuangan daerah;
 - 4) Penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - 5) Perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - 6) Penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - 7) Penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - 8) Penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - 9) Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - 10) Perumusan prioritas pembangunan daerah; dan
 - 11) Perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
 - b. Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD disampaikan secara tertulis kepada Kepala Bappelitbang berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran

- pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- c. Rancangan awal RKPD dibahas dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan, lalu dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Bappelitbang dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
3. Penyusunan rancangan RKPD
Penyusunan rancangan RKPD adalah proses penyempurnaan rancangan awal RKPD disempurnakan berdasarkan:
 - a. Rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah diverifikasi dan
 - b. Hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.
 4. Pelaksanaan Musrenbang RKPD
Musrenbang RKPD bertujuan untuk membahas rancangan RKPD yang dilaksanakan dalam rangka:
 - a. Menyepakati permasalahan pembangunan daerah;
 - b. Menyepakati prioritas pembangunan daerah;
 - c. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator, dan target kinerja serta lokasi;
 - d. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota dengan program

dan kegiatan desa yang diusulkan berdasarkan hasil musrenbang Kecamatan.

5. Perumusan rancangan akhir RKPD

Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD. Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perwal tentang RKPD.

6. Penetapan RKPD

Rancangan Perwal tentang RKPD yang telah disempurnakan disampaikan oleh Kepala Bappelitbang kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan. Peraturan Wali Kota tentang RKPD dijadikan sebagai :

- a. Pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah;
- b. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.

Tahapan panjang dalam proses penyusunan RKPD dimaksud tidak terlepas dari empat pendekatan perencanaan yang berorientasi proses. Pertama *pendekatan teknokratis*, yaitu menggunakan metoda dan kerangka pikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Kedua *pendekatan partisipatif*, dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*). Ketiga *pendekatan politis*, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan KDH terpilih ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan

daerah selama masa jabatan. Dan keempat *pendekatan bawah-atas (bottom-up)* dan *atas-bawah (top-down)* dimana hasilnya diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Selain berorientasi proses, perencanaan pembangunan daerah juga berorientasi pada substansi, dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu pertama, *pendekatan holistik-tematik* dalam perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Kedua, *pendekatan integratif*, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah. Ketiga, *pendekatan spasial*, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

RKPD Kota Bandung Tahun 2021 merupakan pelaksanaan perencanaan tahun pertama dari RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023. Berkenaan dengan hal tersebut, RKPD Kota Bandung Tahun 2020 harus menjadi pondasi yang kokoh untuk merealisasikan target kinerja serta janji wali kota/wakil wali kota yang tertuang dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023.

Dengan tujuan untuk menjaga konsistensi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas seluruh proses perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Kota Bandung

telah menggunakan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran (SIRA). Sejumlah perbaikan sebagai hasil evaluasi penerapan aplikasi tersebut telah dilakukan sehingga diharapkan instrumen ini dapat membantu meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran serta efektivitas dan efisiensi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara signifikan.

Dengan proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu, RKPD Kota Bandung Tahun 2021 menjadi lebih transparan dalam proses penyusunan, dapat dipertanggungjawabkan dari sisi akuntabilitas, konsisten dalam menjaga arah kebijakan jangka menengah, sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat, berkualitas dalam substansi kebijakan, lebih efisien dan efektif dalam pengelolaan RAPBD, serta mencegah kebocoran dan penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang menjadi pedoman pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan Kecamatan Buahbatu dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran RKPD Kota Bandung Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;

2. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

- Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 10. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1312 Tahun 2017);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
 21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2002 Nomor 25);
 23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
 24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18);
 25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2016 Nomor 08 Noreg. Peraturan Daerah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat: (8/294/2016));

26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2018-2023;
27. Peraturan Walikota Bandung Nomor 610 Tahun 2017 tentang Prosedur dan Mekanisme Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran di Lingkup Pemerintah Kota Bandung.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Membuat dokumen rencana kerja pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung selama kurun waktu satu tahun 2021 yang merupakan penjabaran RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 - 2023 dan Renstra Perangkat Daerah, serta menjadi pedoman Renja Perangkat Daerah.
2. Mendokumentasikan rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan, rencana kerja terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun yang melibatkan partisipasi masyarakat.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) khususnya Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2019 adalah :

1. Menyediakan pedoman/acuan pelaksanaan program dan kegiatan bagi seluruh Perangkat Daerah khususnya di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.
2. Menyediakan pedoman/acuan penyusunan KUA-PPAS dan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2019.
3. Sebagai bahan pengendalian, evaluasi kegiatan, dan pengukuran tingkat kinerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Buahbatu.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengatur sistematika penyusunan Dokumen RKPD khususnya di Kecamatan Buahbatu Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penulisan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BUAH BATU TAHUN 2018

- 2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Buahbatu Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja SKPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah. Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Buahbatu.
Sub bab ini berisi uraian mengenai :
 1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan SKPD Kecamatan Buahbatu dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi SKPD;
 3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
 4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD dan
 5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
- Sub-bab ini berisikan uraian mengenai :
1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
 2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
 3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarnya berbeda.
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD.

- 3.1.1 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2024
- 3.1.2 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat.
- 3.1.3 Penelaahan terhadap Rancangan KLHS
- 3.1.1 Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan Tahun 2018

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).

BAB V PENUTUP

BAB II**HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN
BUAHBATU TAHUN 2018**

Untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan rencana pembangunan perlu dilakukan evaluasi Rencana Kerja SKPD dengan mengidentifikasi apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan sehingga dapat diketahui efektivitas pelaksanaan proses perencanaan pembangunan dan kendala-kendala dalam pelaksanaan pembangunan. Hasil evaluasi tersebut sebagai bahan pertimbangan kebijakan di tahun berikutnya.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 dan Capaian Renstra Reviu Kecamatan Buahbatu

Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Buahbatu Kota Bandung Nomor : 900/46/Kec.Bubat Tahun 2019 tanggal 29 Juli 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018 - 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian yang dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan capaian sasaran dalam Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator adalah sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	1. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kecamatan Buahbatu
	2. Meningkatnya peran kelembagaan masyarakat dalam keamanan dan kenyamanan lingkungan
2. Optimalisasi tingkat pemberdayaan masyarakat	3. Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Bersamaan dengan Reviu rencana strategis Kecamatan juga dilakukan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2019 :

**Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2018**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan	Nilai	78,23
		Persentase Temuan BPK Inspektorat yang ditindaklanjuti tepat waktu	%	100,00
2	Meningkatnya Peran Kelembagaan Masyarakat dalam Kemananan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	47,03
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	44,80

Capaian Kinerja Keuangan Tahun 2018

Capaian kinerja keuangan tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung DPA Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dengan total nilai keseluruhan Belanja Langsung adalah sebesar Rp. 14.343.581.506, sedangkan realisasi anggaran sampai dengan tahun 2018 mencapai

sebesar Rp. 14.042.223.335,- atau dengan serapan anggaran dana APBD mencapai 97,89 %.

2.1.1 Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)

Kegiatan SKPD Kecamatan Buahbatu yang dibiayai dari DPA- SKPD Kecamatan Buahbatu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 25.202.561.059,23 yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp. 11.594.566.536,06. Untuk Belanja Langsung (BL) sebesar Rp. 13.607.994.523,21. Adapun Rincian kegiatan meliputi :

- 1. Peningkatan Peran kecamatan dan Kelurahan** dengan anggaran 5.954.479.622; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah:
 - a. Kegiatan Fasilitasi peningkatan perekonomian masyarakat kecamatan & kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 82.039.930, Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen UMKM, Dokumen Koperasi, Dokumen Produksi Unggulan, Dokumentasi Kewirausahaan dan UMKM. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - b. Kegiatan Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan dan kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 721.697.260 Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Kemasyaratakan meliputi kegiatan Dokcil, MTQ, PAUD, Pendataan PMKS, RBM, Tarling, Penanaman TOGA, UKS, Warmis dan WPA. Proporsi

- capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- c. Kegiatan Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 1.898.209.832. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Musrenbang, Dokumen Bank Sampah, Dokumen Biopori, Dokumen Daur Ulang, Dokumen Urban Farming, Dokumen Eco Office, Dokumen Zero Waste, Dokumen Bebersih Sungai. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - d. Kegiatan Fasilitas Peningkatan Kualitas Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 890.625.000. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen PKL, Dokumen Anggota Linmas, dan Dokumen Satwankar. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - e. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.081.373.250. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Pembinaan Administrasi Kelurahan, dan Dokumen Evaluasi Pembinaan Administrasi. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
 - f. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Kepada masyarakat. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 39.711.600. Indikator Output kegiatannya

adalah : Dokumen Kegiatan Pelayanan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

- g. Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan masyarakat. Kegiatan ini mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 240.822.750. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Kegiatan meliputi kegiatan BBGRM,GOPTKI, HJKB, Sumpah pemuda, Kepemudaan, WUB, KNPI, Kewirausahaan,Kompepar, Mabiran, Kwaran, Pembinaan Ormas, Posyantek, Wartek, Pokjanal, PMI, PKK dan Posyandu. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

2. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan dengan anggaran Rp. 4.634.736.289; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM. Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 232 sub kegiatan. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW. Alokasi anggarannya sebesar Rp 3.725.976.739. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup RW. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 64 sub kegiatan.
- b. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 254.579.750. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan

inovatif/pemberdayaan Lingkup Lingkup PKK. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 64 sub kegiatan.

- c. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 354.460.000. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup Karang Taruna. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 68 sub kegiatan.
- d. Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Alokasi anggarannya sebesar Rp. 299.719.800. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Sub Kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup Lingkup Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan adalah sebesar 36 sub kegiatan.

3. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 2.068.249.572; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah Kegiatan pembayaran telepon, internet, listrik, surat kabar dan air. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah 12 bulan.

- b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan pembayaran Pajak Kendaraan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan jasa kebersihan kantor/outshoring. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- e. Penyediaan Alat Tulis Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan Pembelian Alat Tulis Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- f. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan cetakan barang dan penggandaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 1 tahun.
- g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan pembelian komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.

- h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- i. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan alat-alat kebersihan dan perlengkapan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- j. Penyediaan Makanan dan Minuman. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan rapat dan kegiatan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi ke luar daerah. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 1 tahun.
- l. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. Indikator Output Kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.
- m. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran. Indikator Output kegiatannya adalah : jumlah kegiatan jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.

n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah kegiatan jasa tenaga pengamanan kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 12 bulan.

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 712.274.040; proporsi realisasi anggaran sebesar 100% Indikator programnya adalah Meningkatnya tingkat kenyamanan masyarakat atas pelayanan public dan meningkatnya efektivitas kinerja lembaga, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen jumlah Pemeliharaan Rutin /berkala Gedung Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
- b. Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen pembelian perlengkapan gedung. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.
- c. Penyediaan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Indikator Output kegiatannya adalah : Dokumen Pembelian bbm/oli serta suku cadang kendaraan dinas/operasional. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 98%.

- d. Rehab sedang berat. Indikator Output kegiatannya adalah dokumen rehab sedang berat gedung kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan di bandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
- e. Penyediaan Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor. Indikator Output kegiatannya adalah : Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%.

5. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan Proporsi realisasi anggaran Rp. 238.255.000; proporsi realisasi anggaran sebesar 100 % Indikator programnya adalah Meningkatkan disiplin aparatur, Proporsi capaian program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %. kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Penyediaan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari Tertentu. Indikator Output kegiatannya adalah : Cakupan penyediaan pakaian khusus hari-hari tertentu. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.
- b. Penyediaan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya. Indikator Output kegiatannya adalah : Jumlah pegawai yang memakai pakaian dinas lapangan. Proporsi capaian kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100 %.

Tabel 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2018 (tahun berjalan)
Kecamatan Buahbatu

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Peran kecamatan dan Kelurahan	Meningkatnya IKM dan menurunnya keluhan masyarakat atas pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi Peningkatan Perekonomian	Jumlah laporan hasil kegiatan yang menunjang ekonomi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hsil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan									
	Fasilitasi Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan hasil kegiatan yang menunjang kesejahteraan masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peningkatan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan hasil kegiatan kualitas infrastruktur masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peningkatan Kualitas	Jumlah laporan hasil	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	kegiatan kualitas ketentraman dan ketertiban masyarakat								
	Fasilitasi Peningkatan Pemerintahan Umum Kecamatan dan Kelurahan	Jumlah laporan kegiatan peningkatan masyarakat di bidang pemerintahan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Fasilitasi Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah laporan hasil kegiatan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan	Terwujudnya program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan	232 sub kegiatan	100 %	240 sub kegiatan	240 sub kegiatan	100 %	232 sub kegiatan	232 sub kegiatan	100 %
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup RW	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup RW	64 sub kegiatan	100 %	90 sub kegiatan	90 sub kegiatan	100 %	64 sub kegiatan	64 sub kegiatan	100 %
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup PKK	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup PKK	64 sub kegiatan	100 %	76 sub kegiatan	76 sub kegiatan	100 %	64 sub kegiatan	64 sub kegiatan	100 %
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup Karang	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup Karang	68 sub kegiatan	100 %	36 sub kegiatan	36 sub kegiatan	100 %	68 sub kegiatan	68 sub kegiatan	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Taruna	Taruna								
	Fasilitasi Pemberdayaan Lingkup LPM	Jumlah sub kegiatan inovatif/pemberdayaan Lingkup LPM	36 sub kegiatan	100 %	38 sub kegiatan	38 sub kegiatan	100 %	36 sub kegiatan	36 sub kegiatan	100 %
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terwujudnya kapasitas kelembagaan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan Pembayaran Telepon, Listrik, dan Air	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Jasa	Jumlah kegiatan	12	12 bulan	12	12	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	bulan		bulan	bulan				
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah kegiatan Pembayaran Jasa Kebersihan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jumlah kegiatan peralatan perbaikan kerja	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah kegiatan ATK kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah kegiatan barang cetakan dan penggandaan	1 tahun	1 tahun	1 tahun	1 tahun	100 %	1 tahun	1 tahun	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hsil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah kegiatan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah kegiatan kebersihan kantor dan pelayanan rumah tangga	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah kegiatan makanan dan minuman untuk	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		kegiatan kantor								
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah kegiatan perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Kegiatan penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Penyediaan tenaga pendukung Administrasi Perkantoran	Jumlah kegiatan tenaga pendukung Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hsil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Penyediaan Jasa Pengaman Kantor	Jumlah kegiatan Jasa Pengaman Kantor	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100 %	12 bulan	12 bulan	100 %
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya tingkat kenyamanan masyarakat atas pelayanan public dan meningkatnya efektivitas kinerja lembaga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Terpeliharanya Sarana dan prasarana gedung	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hasil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	Gedung Kantor	kantor								
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Terpeliharanya sarana Kendaraan Dinas/Operasioanl	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Terpeliharanya sarana Sedang/Berat Gedung Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor	Tersedianya Dekorasi Ruang Kantor	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin aparatur	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Pengadaan pakaian	tersedianya kebutuhan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2019 | RENCANA KERJA KECAMATAN

NO	Urausan/ Bidang Urausan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2018	Realisasi Target Kinerja Hsil Proram dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2017			Target Program dan Kegiatan Renja SKPD Tahun 2018	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d tahun 2018	
					Target Renja SKPD Tahun 2017	Realisasi Renja SKPD Tahun 2017	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	dinas beserta perlengkapannya	aparatur								
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari/hari Tertentu	Tersedianya pakai khusus hari-hari tertentu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

2.2. ANALISA KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, Kecamatan Buahbatu dituntut untuk mampu berperan sebagai subjek perencanaan kota yang profesional, mampu menyusun perencanaan yang dapat mengakomodasi perubahan yang terjadi baik aspek ekonomi, sosial budaya dan sumberdaya pemerintahan serta fisik dan prasarana secara aktual, faktual dan kontekstual sehingga dapat memberikan kontribusi nyata bagi meningkatnya kemakmuran warga kota (*welfare state*).

Untuk mencapai visi dan misi Kecamatan Buahbatu Kota Bandung melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dalam core strategy dan core policy dan diwujudkan dalam beberapa program. Program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Buahbatu Kota Bandung merupakan strategi pada tingkat kebijakan. Strategi berupa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil jika implementasi program tersebut sesuai dengan visi dan misi yang diemban. Sehingga adanya keterkaitan antara program Kecamatan Buahbatu dengan program tingkat Kota Bandung menjadi mutlak.

Penyelenggaraan urusan perencanaan dan pengendalian pembangunan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 14, ayat (1), Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kewenangan tersebut kemudian dipertegas kembali dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dari 26 (dua puluh enam) urusan sesuai dengan

pasal 7, ayat (2), Kecamatan Buahbatu sebagai salah satu Instansi daerah yang merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah, mengemban 1 (satu) urusan wajib yang wajib dilaksanakan, yaitu Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2009, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung didukung ketersediaan dan kemampuan sumberdaya aparatur, sarana prasarana, pengelolaan anggaran program dan kegiatan, peningkatan produk perencanaan serta kinerja perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan termasuk sinergitas dan koordinasi perencanaan pembangunan antar SKPD, antar Kabupaten/Kota dan dengan pemerintahan Provinsi maupun Pusat.

Selama pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan di Kota Bandung mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang memperlihatkan adanya peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan tersebut meliputi :

1. Meningkatnya fasilitas peningkatan perekonomian masyarakat Kecamatan dan Kelurahan;
2. Meningkatnya fasilitas peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kecamatan dan Kelurahan;
3. Meningkatnya peningkatan infrastruktur dan lingkungan hidup tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Peningkatan Peran Kecamatan dan Kelurahan belum secara signifikan. Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Masih kurangnya SDM yang memiliki kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utamanya;
2. Kebijakan Pemerintah yang belum mendukung terbentuknya jabatan fungsional Perencanaan dan Peneliti di lingkungan Kota Bandung;
3. Belum adanya sistem informasi perencanaan yang terpadu sehingga dokumen serta data dan informasi penting yang belum dikelola dengan baik;
4. Belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan ketersediaan data pembangunan sebagai bahan penyusunan dokumen perencanaan.

Dalam perkembangan Kecamatan Buahbatu kedepan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki, Kecamatan Buahbatu diharapkan responsif, kreatif dan inovatif agar mampu menjawab perubahan lingkungan dan tantangan untuk mewujudkan Pelayanan Prima dan diawali dengan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana melalui peningkatan kapasitas dan komitmen SDM, memantapkan instansi di tingkat basis, serta koordinasi dan komunikasi antar pemangku kepentingan.

Berikut ini Tabel mengenai pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Buahbatu berdasarkan indikator kinerja yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Buahbatu dan Indikator Kinerja Utama :



Tabel 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Buahbatu

No	Sasaran	Indikator	Satuan	Target Tahun ke-				Realisasi Capaian Kinerja		Proyeksi Capaian Kinerja	
				2016	2017	2018	2019	2018	2019	2018	2019
1.1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	Nilai	80.50	81	81,50	84.95	84.50	84.95	100	100
		Persentase Keluhan/Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	%	100	100	-	-	-	-	-	-
		Nilai Standar Kepatuhan Pelayanan Publik Versi Ombudsman RI	Nilai	860	870	-	-	-	-	-	-
2.1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan	Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan Tepat Waktu	%	99,50	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Umum Lainnya Tepat Waktu	%	100	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Kelurahan yang Memenuhi Standar Kriteria Baik	%	75	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase RW Juara	%	45.50	-	-	-	-	-	-	-
		Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	80	-	-	-	-	-	-	-
		Rasio Anggota Linmas	Rasio	1:1.3	-	-	-	-	-	-	-



3.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai AKIP Kecamatan	Nilai	66	68	-	-	-	-	-	-
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	100	-	-	-	-	-	-	-
2	Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat	Persentase Peran serta Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	%	-	50	75	76	75	76	100	100

Untuk meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penjelasan formulasi/cara pengukuran disesuaikan dengan SK Menpan No. 14 Tahun 2017 tentang pedoman penyusunan survei kepuasan masyarakat unit penyelenggara pelayanan publik dimana terdapat 9 (sembilan) komponen yang menjadi nilai unsur pelayanan sebagai indikator penilaian di masing-masing wilayah.

Sasaran 1 (satu) terdiri dari 1 indikator dengan 9 komponen yang menjadi nilai unsur per pelayanan diantaranya sebagai berikut :

- a. Persyaratan
- b. Prosedur
- c. Waktu Pelayanan
- d. Biaya/Tarif
- e. Produk Layanan
- f. Kompetensi Pelaksana
- g. Perilaku Pelaksana
- h. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
- i. Sarana dan Prasarana

Pada sasaran 2 terdiri dari 1 indikator yaitu Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, dimana yang menjadi formulasi/cara pengukurannya berdasarkan persentase rata-rata RW Juara, Siskamling Aktif dan LKK Aktif. Sasaran 2 (dua) yaitu



meningkatnya pemberdayaan masyarakat dengan indikator kinerja utama Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terdiri atas 3 unsur yang menjadi kriteria penilaian.

Kriteria unsur penilaian tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan diantaranya sebagai berikut :

- a) Persentase RW Juara
- b) Siskamling Aktif
- c) Persentase Lembaga Kemasyarakatan Aktif

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2018

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Buahbatu Kota Bandung tahun 2018 menunjukkan hasil sebagai berikut:

**LAPORAN CAPAIAN KINERJA UTAMA KEPALA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2018**

NO	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	KETERANGAN/DATA KINERJA
1	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	75	Nilai	84,25	112,33 %	Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan Rata-rata TW1 sd TW4 = 84,25, merupakan jumlah kumulatif IKM dibagi 5 dengan rincian sebagai berikut : Kecamatan = 84,00 Kel. Margasari = 83,75 Kel. Cijawura = 82,75 Kel. Sekejati = 85,75 Kel. Jatisari = 85,00
2	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	75	%	75	110,86 %	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan = 88,69 % , merupakan jumlah rata2 % RW Juara + LKK Aktif dan Siskamling Aktif dengan rincian sebagai berikut : RW Juara = 84,02 % LKK Aktif = 100,00 % Siskamling Aktif = 82,04 %

1. Pencapaian Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat.

Hasil kinerja nyata indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2018 adalah sebesar 84,25 dari target sebesar 75 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga

persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 11,25 point yaitu 112,33 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja indikator penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang dimana dapat dilihat dari 9 (sembilan) komponen unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kecamatan dan Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Buahbatu dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Buahbatu.

Data Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Buahbatu selama tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

**Data Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Buahbatu Tahun 2018**

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur
U1	Persyaratan	3,37
U2	Prosedur	3,39
U3	Waktu Pelayanan	3,33
U4	Biaya/Tarif	3,34
U5	Produk Layanan	3,38
U6	Kompetensi Pelaksana	3,36
U7	Perilaku Pelaksana	3,36
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	3,33
U9	Sarana dan Prasarana	3,37

Sumber : Kecamatan Buahbatu

Pada tabel diatas dapat kita lihat bahwa unsur/Kecamatan/Kelurahan yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada unsur pelayanan *Waktu Pelayanan* dan *Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan* karena mempunyai posisi terendah pada survey IKM yang dilakukan , sedangkan posisi



nilai tertinggi adalah *Prosedur* harus tetap dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan, untuk lebih jelas kategori tertinggi dan terendah hasil IKM tahun 2018 di Kecamatan Buahbatu yaitu :

1. Nilai kelompok paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu unsur *Prosedur*.
2. Nilai kelompok paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada unsur Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi dari unsur *Prosedur* adalah sebagai berikut :

1. Standar *Prosedur Pelayanan (SPP)* sudah diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Buahbatu.
2. Standar *Operasional *Prosedur (SOP)** yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, sudah mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Sudah dilakukannya secara maksimal tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan yang diterima dari masyarakat, belum tersedianya petugas layanan khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.
4. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai untuk kepentingan pelayanan public yang prima.
5. Tersedianya ruang tunggu yang nyaman dimana masyarakat dapat dengan langsung mengawasi kondisi sekitarnya.



Adapun yang mempengaruhi nilai terendah dari unsur Waktu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan adalah sebagai berikut :

1. Standar Prosedur Pelayanan (SPP) belum diterapkan secara maksimal oleh unit kegiatan pelayanan di Kecamatan Buahbatu.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, belum mencakup seluruh kegiatan yang dilaksanakan.
3. Belum dilakukannya secara maksimal tindak lanjut pengaduan, saran dan masukan yang diterima dari masyarakat, belum tersedianya petugas layanan khusus yang menangani pengaduan dari masyarakat sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat masih dirasakan belum maksimal dan belum membantu kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat terhadap produk layanan yang diberikan oleh pihak Kelurahan dan Kecamatan sehingga mempengaruhi tingkat kepuasan masyarakat dari segi unsur Pengaduan, Saran dan Masukan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Indeks Kepuasan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan IKM yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program kegiatan yang akan dilaksanakan, menindaklanjuti rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menjawab keluhan-keluhan masyarakat terkait dengan ketidakpuasan pelayanan.
2. Kegiatan IKM merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan setiap tahunnya untuk mengukur kepuasan masyarakat atas

kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk pelayanan publik yang lebih prima.

3. Memperbaiki sarana dan prasarana di masing-masing wilayah secara maksimal sesuai dengan anggaran yang tersedia dengan memperhatikan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan dana anggaran, tepat sasaran dan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dari produk layanan yang diberikan oleh Kelurahan maupun Kecamatan.

2. Pencapaian Indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Hasil kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018 adalah sebesar 75 % dari target sebesar 80 % yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, sehingga persentase capaian kinerjanya mengalami kenaikan sebesar 8,69 % yaitu 110,86 % atau melebihi target yang diperjanjikan.

Pencapaian hasil kinerja pada indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan dapat dilihat dari 3 (tiga) kriteria unsur pelayanan dari masing-masing wilayah kerja Kelurahan khususnya yang ada wilayah Kecamatan Buahbatu dan Kelurahan yang dibawah koordinasi Kecamatan Buahbatu. Ketiga kriteria tersebut diantaranya RW Juara, Siskamling Aktif, dan LKK Aktif.

Dapat kita lihat bahwa kriteria yang menduduki memenuhi skala prioritas untuk perbaikan adalah pada Siskamling Aktif karena mempunyai posisi terendah pada survey Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan , sedangkan posisi nilai tertinggi adalah pada LKK Aktif yang harus tetap dipertahankan, untuk lebih jelas kriteria tertinggi dan terendah hasil Tingkat



Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tahun 2018 di Kecamatan Buahbatu yaitu :

1. Kriteria paling tinggi yang harus tetap dipertahankan yaitu LKK Aktif.
2. Kriteria paling rendah yang harus ditingkatkan yaitu pada Siskamling Aktif.

Adapun yang mempengaruhi nilai tertinggi sebagai berikut :

1. Hampir seluruh LKK di Kelurahan telah memenuhi kriteria penilaian LKK Aktif.
2. Seluruh Lembaga Kemasyarakatan Kecamatan/Kelurahan telah mempunyai rencana/program kerja tahunan yang menunjang pembangunan dan pemberdayaan sesuai dengan ruang lingkup Kecamatan/Kelurahan.
3. LKK melaksanakan minimal 60% dari seluruh agenda/program kerja yang direncanakan pada tahun berjalan.
4. Minimal 60% Ketua/Pengurus Lembaga kemasyarakatan Kecamatan dan Kelurahan hadir dalam pembahasan musrenbang Kecamatan.

Adapun yang mempengaruhi nilai terendah (Siskamling Aktif) sebagai berikut :

1. Masih adanya kriteria Siskamling Aktif yang ditetapkan belum dilaksanakan sepenuhnya di lingkungan RW.
2. Belum meratanya pelaksanaan kelompok siskamling di lingkungan RW.



3. Belum sepenuhnya pelaksanaan jadwal siskamling atau ronda di lingkungan RW.
4. Masih adanya pengurus RW yang belum mengetahui dan memahami kriteria Siskamling Aktif.

Capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan pada Tahun 2018 adalah sebesar 88,69 % bila dibandingkan dengan capaian kinerja nyata tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 8,92 % atau capaian mengalami peningkatan sebesar 11,18 % terhadap realisasi tahun 2017 sebesar 79,77%.

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling tinggi ada pada kriteria Siskamling Aktif sedangkan pada tahun 2018 menjadi paling rendah, hal ini disebabkan adanya penurunan tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur dengan kurangnya kegiatan siskamling atau ronda malam di masing-masing lingkungan RW. Hal ini perlu adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat terhadap pelaksanaan forum jaga lembur sehingga dapat tercipta kembali suasana ketentraman dan ketertiban di masing-masing wilayah khususnya di kewilayahan Kecamatan Buahbatu dan Kota Bandung pada umumnya.

Pada tahun 2017 capaian kinerja nyata indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan paling rendah ada pada kriteria RW Juara sedangkan pada tahun 2018 kriteria RW Juara ada peningkatan, yang menjadi faktor pendukung meningkatnya kriteria RW Juara adalah dengan adanya keberhasilan program inovasi pembangunan dan pemberdayaan kewilayahan yang menjadi program kerja dan kegiatan di masing-masing kewilayahan, dimana komponen kriteria RW Juara telah dimasukkan kedalam kegiatan yang menjadi sasaran program meningkatnya pemberdayaan masyarakat.



Keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan disebabkan faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut :

Faktor Pendukung :

1. Pemahaman masyarakat tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan sudah dilaksanakan di setiap RW/kampung.
2. Sosialisasi yang intensif dari Kelurahan dan Kecamatan tentang kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan terus dilakukan.

Faktor Penghambat :

1. Keberadaan masyarakat yang tidak peduli dengan kondisi lingkungan (Individualis).
2. Karakteristik warga masyarakat , jumlah penduduk, pendidikan, mata pencaharian, sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian program kriteria Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Untuk meningkatkan capaian indikator kinerja Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis tersebut diatas, maka dimasa yang akan datang direkomendasikan / solusi / rencana aksi sebagai berikut :

1. Memperhatikan nilai-nilai yang diperoleh dari kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang dilakukan maka perlu kiranya kami menindaklanjuti dengan menyusun program yang akan dilaksanakan, melaksanakan rencana aksi yang telah ditentukan dan memanfaatkan dana anggaran untuk menjawab agar tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan ke depan jauh lebih baik.



2. Melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warga masyarakat tentang program yang mendukung tercapainya pemberdayaan masyarakat berdasarkan kriteria penilaian kegiatan tingkat pemberdayaan lembaga kemasyarakatan di lingkup RW, PKK, Karang Taruna dan LPM.
3. Kegiatan Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan merupakan kegiatan yang harus dilakukan setiap tahunnya untuk mengukur tingkat pemberdayaan masyarakat atas kinerja yang dilakukan serta sebagai bahan evaluasi perbaikan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggara pemerintah daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan atau sasaran strategis organisasi. Tujuan penetapan IKU yaitu untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Target IKU tercantum dalam RPJMD dan realisasinya ditentukan berdasarkan capaian pada setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pelayanan perangkat daerah tahun 2018 mencakup telaahan terhadap Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah di lingkungan Kecamatan Buahbatu Kota Bandung, dan dengan terpilihnya Walikota dan Wakil Walikota baru maka RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 –



2023 memiliki tujuan dan sasaran untuk mencapai visi dan misi Kota Bandung.



2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan tugas dan Fungsi Kecamatan Buahbatu

Untuk mewujudkan dinamika dan sinkronisasi antara kegiatan Kecamatan Buahbatu dengan kebutuhan dan kondisi faktual yang ada dalam organisasi, maka pengenalan lingkungan strategis sangat penting untuk diperhatikan dalam konteks analisis lingkungan strategis ini. Untuk itu Kecamatan Buahbatu berupaya mengenali lebih dalam faktor-faktor internal dan eksternal yang diprediksi dapat mempengaruhi terhadap kinerja pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung.

Permasalahan diidentifikasi berdasarkan penyelenggaraan pembangunan yang dibuat tiap urusan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan Kecamatan Buahbatu, yaitu permasalahan tingkat pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat implementasi permasalahan yang menyangkut layanan dasar dan tugas/fungsi urusan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat diantaranya sebagai berikut :

1. Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Buahbatu belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal.
2. Permasalahan penanganan banjir/ genangan di Kecamatan Buahbatu sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air.
3. Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan.

4. Permasalahan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dimana masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS).
5. Permasalahan terkait kegiatan koperasi usaha kecil menengah di kewilayahan diantaranya keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk.
6. Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat.
7. Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat.

Pada tingkat implementasi permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Buahbatu, sebagai berikut :

1. Kurangnya pemahaman SDM Kecamatan dan Kelurahan ;
2. Masih belum optimalnya pelaporan program dan kegiatan Kecamatan dan Kelurahan kepada Pemerintah Kota Bandung ;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan ;
4. Perencanaan kegiatan yang dilakukan PPTK masih belum berbasis kinerja sehingga masih banyak belum mendukung outcome.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Buahbatu sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang kewenangannya dilimpahkan sebagian oleh Walikota adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Buahbatu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah :

1. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan kewenangan kepada Camat dan Lurah yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Belum adanya koordinasi yang baik dengan satuan kerja perangkat daerah lain di lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Buahbatu.

No	Permasalahan	Analisis	Identifikasi Isu Strategis
1	Tingkat pelayanan publik secara kualitas baik di Kelurahan dan Kecamatan Buahbatu belum menunjukkan secara signifikan dan maksimal	Tingkat pelayanan publik masih menjadi permasalahan utama bagi kewilayahan, hal ini menjadi tugas dan fungsi urusan pelayanan dasar bagi setiap Kecamatan. Meningkatkan pelayanan publik menjadi tugas dan fungsi kewilayahan sesuai dengan misi kota Bandung yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih.	Standar Pelayanan Kewilayahan
2	Permasalahan penanganan banjir/genangan di Kecamatan Buahbatu sangat erat kaitannya dengan optimalisasi pengelolaan drainase, dan sumber daya air	Penanganan permasalahan genangan di Kecamatan Buahbatu saat ini masih belum optimal karena di beberapa titik lokasi banjir / genangan belum dapat terselesaikan. Penyebab dari banjir / genangan adalah kurangnya kapasitas drainase primer, belum terintegrasinya saluran drainase, dan belum optimalnya kualitas saluran drainase sekunder dan tersier atas kiriman air dari wilayah atas. Permasalahan yang terkait drainase primer adalah pendangkalan sungai akibat sedimentasi dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai akibat pelanggaran pemanfaatan ruang, sedangkan permasalahan terkait drainase sekunder dan tersier adalah tidak optimalnya kapasitas saluran drainase sekunder dan tersier, belum optimalnya inspeksi saluran drainase, dan desain teknis drainase yang bermasalah	Peran serta dan partisipasi masyarakat dalam menciptakan kenyamanan lingkungan

3	<p>Permasalahan pada urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kecamatan Buahbatu, diantaranya adalah potensi gangguan ketenteraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan</p>	<p>Dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi di kewilayahan Kecamatan Buahbatu berpotensi meningkatnya angka kriminalitas dan masalah sosial lainnya. Kepadatan penduduk merupakan salah satu faktor penyebab tingginya kriminalitas yang dapat mengganggu ketentraman, kenyamanan dan ketertiban lingkungan. Penanganan permasalahan keamanan dan kenyamanan lingkungan tidak hanya ada dipihak aparat keamanan seperti Kepolisian dan Rayon Militer, akan tetapi peran serta masyarakat dan kelembagaan yang menjadi ujung tombak di masing-masing wilayah dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Peran kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, hal ini dapat terlihat dari tingkat permasalahan sosial dan tindak pidana masih ada</p>	<p>Peran serta masyarakat, kelembagaan dalam meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan</p>
4	<p>Permasalahan terkait lingkungan hidup dan pengelolaan sampah dimana masalah utama yang dihadapi Kota Bandung adalah tidak dimilikinya fasilitas Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS)</p>	<p>TPPAS yang digunakan saat ini merupakan TPA yang bersifat sementara dan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan usia pakainya akan segera berakhir. Dengan pola pengelolaan sampah Kota Bandung yang masih bertumpu pada pola Kumpul – Angkut – Buang, maka permasalahan TPA ini akan menjadi masalah besar di kemudian hari apabila tidak segera diantisipasi. Karenanya, perubahan pola pengelolaan mutlak diperlukan, diantaranya dengan mengintensifkan pola pengelolaan sampah secara 3R (<i>Reduce, Reuse dan Recycle</i>).</p>	<p>Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mewujudkan pengelolaan sampah perlu ditingkatkan dan disosialisasikan kembali</p>

		<p>Berdasarkan hasil Kajian Kinerja Pengelolaan Sampah secara 3R yang dilakukan pada tahun 2017, diperoleh informasi bahwa pengelolaan sampah secara 3R yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah sudah mencapai 14,32% dari total timbulan sampah per harinya atau sekitar 214,6 ton/hari. Jumlah tersebut didapat melalui pelaksanaan Kawasan Bebas Sampah oleh masyarakat yang didukung oleh pemerintah melalui pemberian sarana pengolahan sampah di sumber seperti biopori, komposter, takakura, bata terawang dan biodigester. Di sisi lain, pengurangan produksi sampah pun didorong melalui kebijakan pelarangan penggunaan Styrofoam dan anjuran membawa tumbler dan misting ke sekolah. Dan salah satu keterlibatan yang tidak kalah penting adalah Sektor Informal, seperti pemulung - tukang rongsok - Bandar rongsok yang memiliki peran sangat besar dalam proses pemilahan dan pengambilan sampah potensi daur ulang</p>	
5	Permasalahan terkait kegiatan koperasi usaha kecil menengah di kewilayahan	<p>keterbatasan kemampuan KUKM untuk mengakses pembiayaan, kualitas sumber daya manusia (SDM) pengelola koperasi masih rendah, masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota koperasi, dan keterbatasan KUMKM dalam melakukan pemasaran produk</p>	<p>Peran aktif masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung program kerja pemerintah kota Bandung</p>
6	Belum optimalnya kegiatan penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi	<p>Kegiatan penguatan kelembagaan masih menjadi permasalahan dengan ditandai kurangnya partisipasi masyarakat yang ikut dan berperan secara aktif pada lembaga-lembaga swadaya masyarakat seperti Karang</p>	<p>Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat</p>

	masyarakat	Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat baru dimulai sejak tahun anggaran 2017 dan hanya pencapaiannya sebesar 71,76% dari total anggaran yang disediakan sebesar 395 juta.	
7	Kurangnya kapasitas SDM pelaku pemberdayaan masyarakat	Kurangnya sumber daya manusia yang kompeten sebagai pelaku dan pelaksana kegiatan dapat mengakibatkan tersendat dan terhambatnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Peran pelaksana kegiatan sangat penting untuk ditingkatkan dan optimalisasikan sehingga seluruh aktifitas dan pelaksana kegiatan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana yang telah dicanangkan sebelumnya.	Peningkatan pembinaan kinerja aparatur

Untuk menentukan prioritas berdasarkan isu strategis tersebut digunakan sejumlah kriteria sebagai bahan scoring (pembobotan) sehingga dapat ditentukan peringkat terhadap prioritas yang ditentukan. Kriteria yang digunakan adalah :

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah.
3. Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat.
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah.
5. Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola.
6. Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan.

Dengan menggunakan kriteria tersebut dilakukan pembobotan berdasarkan signifikansi isu terhadap penyelesaian masalah dan peningkatan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat. Pembobotan berdasarkan kriteria tersebut dapat dilihat dibawah ini sebagai berikut :

No	Kriteria	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah	15 %
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah	15 %
3	Dampak yang ditimbulkan terhadap daerah dan masyarakat	15 %
4	Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah	15 %
5	Kemungkinan atau kemudahan untuk dikelola	15 %
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25 %

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKP

Berbagai ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandung, sebagai pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat untuk memperlancar dan menperpadukan setiap usaha untuk mencapai tujuan, sasaran serta visi dan misi yang telah diuraikan sebelumnya haruslah di tuangkan dalam bentuk kebijakan.

Dengan demikian maka arah makro kebijakan Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Buahbatu
2. Kebijakan meningkatkan peran kelembagaan, masyarakat dalam menciptakan keamanan dan kenyamanan di kewilayahan
3. Kebijakan meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan.

Berangkat dari Kebijaksanaan Kecamatan Buahbatu, Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kecamatan Buahbatu yang Berjalan lebih Efektif, Efisien, Transparan, dan akuntabel dengan program dan kegiatan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai berikut :

Rencana Kegiatan Sekretariat Kecamatan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat Kecamatan Tahun Anggaran 2018 Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
- c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas /operasional.
- d. Penyediaan jasa kebersihan kantor;
- e. Penyediaan alat tulis kantor;
- f. Penyediaan barang cetak dan penggandaan;
- g. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor;
- h. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
- i. Penyediaan peralatan rumah tangga;
- j. Penyediaan peralatan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;
- k. Penyediaan makan dan minum;
- l. Rapat-rapat koordinasi dan kunsultasi ke luar daerah;
- m. Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran;
- n. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor.

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

- a. Pembangunan Gedung Kantor;
- b. Pengadaan Perlengkapan Gedung ;
- c. Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor;
- d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional kecamatan dan kelurahan;
- e. Pengadaan Dekorasi Ruang Kantor.

3. Program peningkatan disiplin aparatur

- a. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;
- b. Pengadaan Pakaian Korpri;
- c. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu.

4. Program peningkatan peran kecamatan dan kelurahan.

Rencana Kegiatan Seksi Pemerintahan

- a. Terciptanya tertib administrasi kependudukan di RT, RW dan Kelurahan;
- b. Terlaksananya sosialisasi PBB;
- c. Terlaksananya pendataan profil dan tipologi kecamatan;
- d. Terlaksananya pendataan monografi Kecamatan;
- e. Terlaksananya lomba kinerja kelurahan;
- f. Terlaksananya pembinaan administrasi RT/RW;
- g. Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang tentang RT/RW;
- h. Terlaksananya sosialisasi peraturan daerah tentang prosedur administrasi kependudukan;
- i. Terlaksananya pendataan organisasi parpol;
- j. Terlaksananya pendataan batas wilayah antar kelurahan;
- k. Terlaksananya pemutakhiran data kependudukan;
- l. Terlaksananya pendataan RT/RW;
- m. Terciptanya kesadaran masyarakat dalam mengurus identitas kependudukan dan terciptanya kenyamanan pelayanan;
- n. Terlaksananya sosialisasi pelayanan kepada masyarakat;
- o. Tersedianya media informasi pelayanan;

- p. Meningkatnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kepada masyarakat;

Rencana Kegiatan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Lingkungan Hidup

- a. Tersedianya data perekonomian masyarakat;
- b. Terlaksananya kegiatan monitoring produk unggulan dan UKM;
- c. Terlaksananya kegiatan monitoring pra koperasi/Koperasi;
- d. Terlaksananya kegiatan pembinaan dan pelatihan Koperasi dan UKM;
- e. Terlaksananya evaluasi dan sosialisasi program BAWAKU MAKMUR Tingkat Kelurahan;
- f. Terfasilitasinya kegiatan P2KB/PNPM
- g. Tersusunnya pembangunan wilayah kecamatan dan musrenbang tingkat Kelurahan;
- h. Evaluasi pelaksanaan pembangunan tingkat kelurahan;
- i. Terselenggaranya pra Musrenbang tingkat Kelurahan;
- j. Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan;
- k. Terselenggaranya sosialisasi lingkungan sehat;
- l. Terselenggaranya sosialisasi lingkungan sehat;
- m. Terlaksananya pembangunan fasilitas infrastruktur lingkungan masyarakat;
- n. Terlaksananya pembangunan taman kecamatan;
- o. Terlaksananya pengadaan bibit tanaman , penanaman dan pemeliharaan pohon per Kelurahan;
- p. Terwujudnya partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan;
- q. Terlaksananya pembangunan infrastruktur per kelurahan;

- r. Terlaksananya pembuatan sumur resapan.
- s. Terlaksananya pembuatan biopori.

Rencana Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat

- a. Terlaksananya pendataan dan pembinaan kelompok seni budaya tradisional;
- b. Terlaksananya pendataan organisasi kemasyarakatan;
- c. Terfasilitasnya kegiatan PKK, Karang Taruna dan LPM kecamatan;
- d. Terfasilitasnya kegiatan Dharma Wanita , GOP TKI;
- e. Terfasilitasnya kegiatan Pramuka, Kepemudaan dan Pelatihan Kepemimpinan;
- f. Terfasilitasnya kegiatan Jambore Lansia, Pelatihan Lansia, Pembentukan Kampung KB, Kampung Kreatif, Lomba Karya Tulis,PUG, Pokjanal, LLI, Kompepar, PMI, PPSI, BBGRM dan KB Lestari.

Rencana Kegiatan Seksi Kesejahteraan Sosial

- a. Tersedianya data sarana dan prasarana sosial masyarakat;
- b. Terlaksananya pendataan penyandang masalah sosial;
- c. Terlaksananya pendataan keluarga miskin (Warmis);
- d. Terlaksananya pendataan dan pembinaan kelompok seni budaya tradisional;
- e. Terlaksananya pendataan organisasi kemasyarakatan ;
- f. Terlaksananya pendataan penyelenggaraan pendidikan formal dan informal;
- g. Terselenggaranya tarawih keliling;
- h. Terselenggaranya Kegiatan PHBN dan PHBI;
- i. Terselenggaranya kegiatan MTQ;



- j. Terselenggaranya kegiatan Dokcil, UKS, PAUD, WPA, Keluarga Sakinah, FORMI, dan PMKS;
- k. Terselenggaranya kegiatan Lomba-lomba seperti Lomba Sekolah Sehat, Lomba bagi penyandang Disabilitas dan lomba-lomba lainnya;
- l. Terselenggaranya kegiatan character Building Garda PPKS dan TKSK.

Rencana Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban (Trantib)

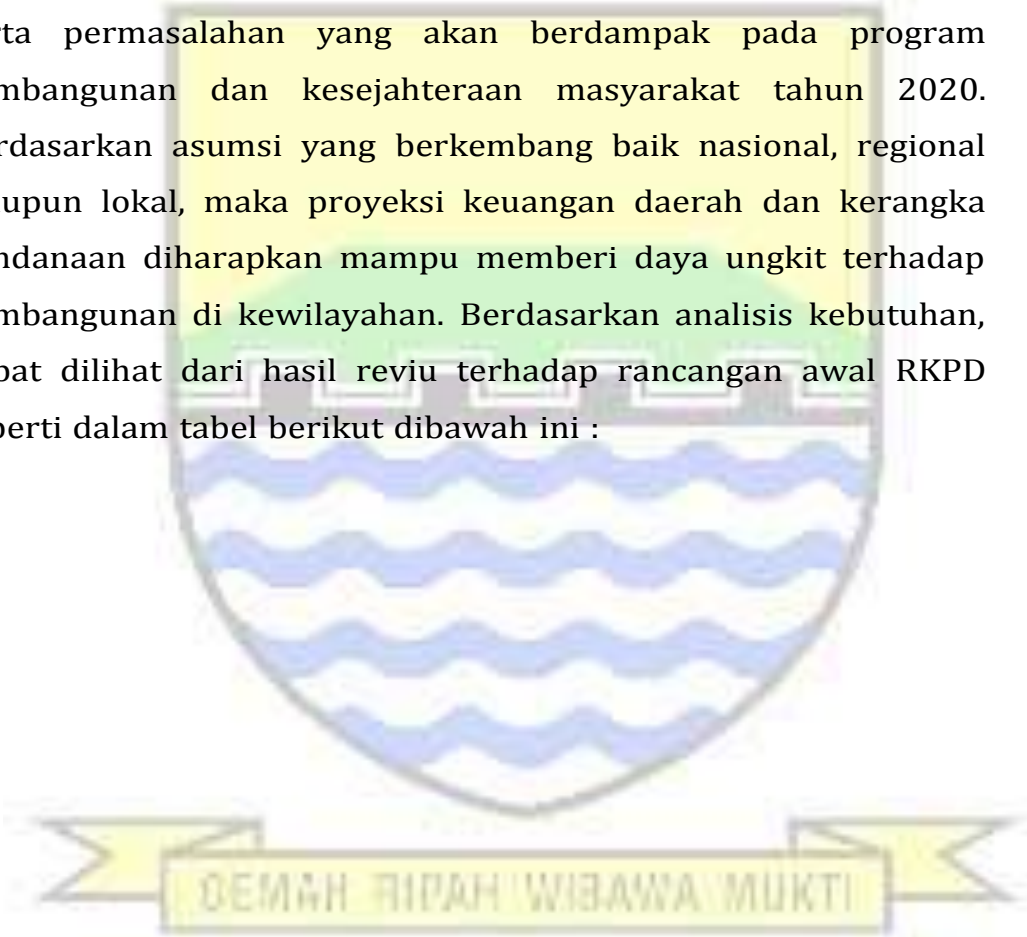
- a. Terwujudnya kesiagaan Linmas dan satwarkar dalam penanganan bencana, terbinanya dan tertatanya PKL di wilayah Kecamatan;
- b. Terlaksananya sosialisasi Perda K-3 Nomor 11 tahun 2005 tentang K3;
- c. Terlaksananya pendataan dan pembinaan PKL;
- d. Terlaksananya penertiban dan pembinaan PKL;
- e. Tersedianya sarana dan prasarana satwankar;
- f. Terlaksananya pembinaan potensi trantib;
- g. Terlaksananya pembinaan linmas /hansip;
- h. Terlaksananya koordinasi dan kerjasama dalam monitoring kamtibmas di lingkungan kecamatan;

Rumusan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung tahun 2020 tidak lepas dari pencapaian pembangunan pada tahun 2018, proyeksi tahun 2019 dan 2020. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020, merupakan rencana pada tahun kedua Kepala Daerah periode 2019 – 2023 dan implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung tahap IV. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat



tergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan yang disepakati.

RKPD Kecamatan Buahbatu tahun 2020, berfokus pada kinerja RPJMD 2018 – 2023 Kota Bandung dan Renstra Kecamatan Buahbatu Tahun 2018 – 2023 yang belum tercapai serta permasalahan yang akan berdampak pada program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat tahun 2020. Berdasarkan asumsi yang berkembang baik nasional, regional maupun lokal, maka proyeksi keuangan daerah dan kerangka pendanaan diharapkan mampu memberi daya ungkit terhadap pembangunan di kewilayahan. Berdasarkan analisis kebutuhan, dapat dilihat dari hasil reviu terhadap rancangan awal RKPD seperti dalam tabel berikut dibawah ini :



TABEL 3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPd TAHUN 2019
KECAMATAN BUAHBATU KOTA BANDUNG

NO	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KECAMATAN BUAHBATU		12 bulan	Rp 2.394.456.936	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	KECAMATAN BUAHBATU		12 bulan	Rp 2.394.456.936	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Rp 198.555.572	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	12 bulan	Rp 198.555.572	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan	12 bulan	Rp 12.561.500	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan	12 bulan	Rp 12.561.500	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	12 bulan	Rp 62.133.000	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	12 bulan	Rp 62.133.000	



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.0 5.4.0	Kegiatan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran jasa	12 bulan	Rp 186.960.000		Kegiatan Penyediaan Jasa	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pembayaran	12 bulan	Rp 186.960.000	62
3.1.01.08	Kebersihan Kantor	ATU	n jasa kebersihan kantor				Kebersihan Kantor		jasa kebersihan kantor			
4.0 5.4.0 5.3 1.01.09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	12 bulan	Rp 79.770.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	12 bulan	Rp 79.770.000	
4.0 5.4.0 5.3 1.01.10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan ATK	12 bulan	Rp 159.984.184		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan ATK	12 bulan	Rp 159.984.184	
4.0 5.4.0 5.3 1.01.11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	12 bulan	Rp 141.588.450		Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	12 bulan	Rp 141.588.450	
4.0 5.4.0 5.3 1.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Rp 39.749.680		Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/penerangan	12 bulan	Rp 39.749.680	
4.0 5.4.0 5.3 1.01.13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan	Rp 289.615.578		Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	12 bulan	Rp 289.615.578	



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.0	Kegiatan	KECAM	Jumlah	12	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah	12	Rp	
5 .	Penyediaan	ATAN	kegiatan	bulan	60.227.200	Penyediaan	BUAHBATU	kegiatan	bulan	60.227.200	
4.0	Peralatan	BUAHB	pengadaan			Peralatan		pengadaan			



Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu Tahun 2019



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

5.3 1. 01. 14	Rumah Tangga	ATU	penyediaan peralatan rumah tangga				Rumah Tangga		penyediaan peralatan rumah tangga		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	KECAM ATAN BUAHB ATU	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	Rp 36.321.172		Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan	12 bulan	Rp 36.321.172
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	KECAM ATAN BUAHB ATU	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Rp 292.990.600		Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	12 bulan	Rp 292.990.600
4.0 5. 4.0 5.3 1. 01. 18	Kegiatan Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KECAM ATAN BUAHB ATU	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Rp 180.000.000		Kegiatan Rapat- Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	12 bulan	Rp 180.000.000
4.0 5. 4.0 5.3 1.0 1.1 9	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	KECAM ATAN BUAHB ATU	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	12 bulan	Rp 544.200.000		Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	12 bulan	Rp 544.200.000
4.0 5. 4.0 5.3	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan	KECAM ATAN BUAHB ATU	Jumlah kegiatan jasa pengaman	12 bulan	Rp 109.800.000		Kegiatan Penyediaan jasa pengamana	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah kegiatan jasa pengamanan kantor	12 bulan	Rp 109.800.000



1.0	kantor		an kantor			n kantor				
1.2										
4.0	PROGRAM	KECA				PROGRAM	KECAMATAN			
5.0	PENINGKATAN	MATA				PENINGKATAN	BUAHBATU			
4.0	SARANA DAN	N		100%	Rp	SARANA DAN			100%	Rp
5.3	PRASARANA	BUA			814.097.113	PRASARANA				814.097.113
1.02	APARATUR	HB				APARATUR				
1.02		ATU								
4.0	Kegiatan	KECA	Jumlah	1	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah sub	1	Rp
5.0	Pengadaan	MATAN	sub	tahun	158.703.065	Pengadaan	BUA	kegiatan	tahun	158.703.065
4.0	Kendaraan	HB	kegiatan			Kendaraan	ATU	pengadaan		
5.3	Dinas	ATU	pengadaan			Dinas		kendaraan		
1.02			kendaraan					dinas		
02.06			dinas							
4.0	Kegiatan	KECA	Jumlah	1	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah sub	1	Rp
5.0	Pengadaan	MATAN	sub	tahun	-	Pengadaan	BUA	kegiatan	tahun	-
4.0	Perengkapan	HB	kegiatan			Perengkapan	ATU	pengadaan		
5.3	Gedung	ATU	perengkapan			Gedung		perengkapan		
1.02	Kantor		gedung			Kantor		gedung kantor		
02.07			kantor							
4.0	Kegiatan	KECA	Jumlah	1	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah	1	Rp
5.0	Pengadaan	MATAN	pengadaan	paket	74.800.000	Pengadaan	BUA	pengadaan	paket	74.800.000
4.0	Peralatan	HB	Dekorasi			Peralatan	ATU	Dekorasi		
5.3	Rumah	ATU	Kantor			Rumah		Kantor		
1.02	Jabatan/Dinas					Jabatan/Dinas				
02.22										
4.0	Kegiatan	KECA	Jumlah	12	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah	12	Rp
5.0	Pemeliharaan	MATAN	gedung	bulan	120.650.048	Pemeliharaan	BUA	gedung	bulan	120.650.048
4.0	Rutin/Berkala	HB	kantor			Rutin/Berkala	ATU	kantor		
5.3	Gedung	ATU	yang di			Gedung		yang di		
1.02	Kantor		pelihara			Kantor		pelihara		
02.24										
4.0	Kegiatan	KECA	Jumlah	1	Rp	Kegiatan	KECAMATAN	Jumlah	1	Rp
5.0	Pemeliharaan	MATAN	kendaraan	tahun	459.944.000	Pemeliharaan	BUA	kendaraan	tahun	459.944.000
4.0	Rutin/Berkala	HB	dinas			Rutin/Berkala	ATU	dinas		
5.3	Kendaraan	ATU	operasional			Kendaraan		operasional		
1.02	Dinas/Operasional		yang			Dinas/Operasional		yang		
02.02			dipelihara					dipelihara		





42												
4.0 5. 4.0 5.3 1. 02. 52	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat t Gedung Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 tahun	Rp -	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah Rehab Gedung Kantor	1 tahun	Rp -		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	KECAMATAN BUAHBATU		1 paket	Rp 182.940.000	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	KECAMATAN BUAHBATU		1 paket	Rp 182.940.000		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 03. 02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	Rp 31.250.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	1 paket	Rp 31.250.000		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 03. 05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	Rp 151.690.000	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus/Hari-hari tertentu	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	1 paket	Rp 151.690.000		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 03. 06	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian KORPRI	1 paket	Rp -	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian KORPRI	1 paket	Rp -		
4.0 5. 4.0	Program Peningkatan Kapasitas	KECAMATAN BUAHBATU		12 bulan	Rp 172.500.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	KECAMATAN BUAHBATU		12 bulan	Rp 172.500.000		





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

5.3 1. 05	Sumber Daya Aparatur	U				Daya Aparatur						
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25. 004	Pembinaan Kinerja Aparatur	KECAMAT AN BUAHBAT U	Jumlah pegawai yang mendapatk an pembinaan	12 bulan	Rp 172.500.000		Pembinaan Kinerja Aparatur	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	12 bulan	Rp 172.500.000	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25	Program Pemberdaya an KUMKM	KECAMA TAN BUAHBAT U	(% UMKM yang meningkat kemampua n usahanya)	50%	Rp 30.597.750		Program Pemberdayaan KUMKM	KECAMATAN BUAHBATU	(% UMKM yang meningkat kemampuan usahanya)	50%	Rp 30.597.750	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25. 001	Kegiatan Pemberdaya an KUMKM kewilayah an	KECAMAT AN BUAHBAT U	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan /kelurahan	50%	Rp 30.597.750		Kegiatan Pemberdaya an KUMKM kewilayah an	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah KUKM aktif di wilayah kecamatan/kel urahan	50%	Rp 30.597.750	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25	Program Pelayanan Pemberdaya an Kewilayah an	KECAMAT AN BUAHBAT U	% Posyandu mandiri tingkat Kecamata n	58.33 %	Rp 94.800.000		Program Pelayanan Pemberdayaan Kewilayah an	KECAMATAN BUAHBATU	% Posyandu mandiri tingkat Kecamatan	58.33%	Rp 94.800.000	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25. 005	Kegiatan Penguatan Kelembaga an Swadaya Masyarakat	KECAMAT AN BUAHBAT U	% Kejadian balita Gizi Buruk Balita di Kecamatan	58,33 %	Rp 94.800.000		Kegiatan Penguatan Kelembaga an Swadaya Masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	% Kejadian balita Gizi Buruk Balita di Kecamatan	58,33%	Rp 94.800.000	
		KECAMAT AN BUAHBAT U	Jml Kader Posyandu dan Pokjanel Posyandu Aktif					KECAMATAN BUAHBATU	Jml Kader Posyandu dan Pokjanel Posyandu Aktif			





4.0 5.0 4.0 5.3 1.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	Rp 62.250.000	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	KECAMATAN BUAHBATU	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	75%	Rp 62.250.000
4.0 5.0 4.0 5.3 1.33 005	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota		Rp 62.250.000	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota		Rp 62.250.000
4.0 5.0 4.0 5.3 1.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	KECAMATAN BUAHBATU	% Rata rata RW Yang memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana	12 bulan	Rp 997.275.300	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	KECAMATAN BUAHBATU	% Rata rata RW Yang memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana	12 bulan	Rp 997.275.300
4.0 5.0 4.0 5.3 1.15 005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	KECAMATAN BUAHBATU	% konflik yang ditindaklanjuti/ fasilitasi	12 bulan	Rp 997.275.300	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	KECAMATAN BUAHBATU	% konflik yang ditindaklanjuti/ fasilitasi	12 bulan	Rp 997.275.300
4.0 5.0 4.0 5.3 1.42	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum	KECAMATAN BUAHBATU	Kerb dan Drainase kewilayahan Terpeliharaan	12 bulan	Rp 2.174.489.686	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum	KECAMATAN BUAHBATU	Kerb dan Drainase kewilayahan Terpeliharaan	12 bulan	Rp 2.174.489.686
4.0 5.0 4.0	Kegiatan Pemeliharaan	KECAMATAN BUAHBATU	Luasan Drainase kelurahan/	12 bulan	Rp 1.446.521.150	Kegiatan Pemeliharaan	KECAMATAN BUAHBATU	Luasan Drainase kelurahan/kec	12 bulan	Rp 1.446.521.150





5.3 1. 42. 014	Drainase dan Kebersihan Lingkungan	U	kecamatan terpelihara			Drainase dan Kebersihan Lingkungan		amatan terpelihara			
4.0 5. 4.0 5.3 1. 42. 015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	Luasan RTH kecamatan terpelihara	12 bulan	Rp 246.194.936	Pemeliharaan RTH Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	Luasan RTH kecamatan terpelihara	12 bulan	Rp 246.194.936	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 42. 016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	KECAMATAN BUAHBATU	Kerb Jalan Terpelihara	12 bulan	Rp 481.773.600	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	KECAMATAN BUAHBATU	Kerb Jalan Terpelihara	12 bulan	Rp 481.773.600	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 20	Program Pengadministrasi Pelayan Kependudukan dan Pemerintahan	KECAMATAN BUAHBATU	Rata rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	84	Rp 1.721.696.593	Program Pengadministrasi Pelayan Kependudukan dan Pemerintahan	KECAMATAN BUAHBATU	Rata rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	84	Rp 1.721.696.593	
4.0 5. 4.0 5.3 1. 20. 001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayah an	KECAMATAN BUAHBATU	IKM Kecamatan / kelurahan per triwulan	84	Rp 28.496.593	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayah an	KECAMATAN BUAHBATU	IKM Kecamatan/ kelurahan per triwulan	84	Rp 28.496.593	
4.0 5. 4.0 5.3	Kegiatan Pembinaan RT RW	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah RW RT yang mendapatkan	55 RT/RW	Rp 1.693.200.000	Kegiatan Pembinaan RT RW	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	55 RT/RW	Rp 1.693.200.000	





1. 20. 002			Pembinaan									
4.0 5. 4.0 5.3 1. 19	Program Perencanaan Pembangunan daerah	KECAMATAN BUAHBATU	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	Rp -	Program Perencanaan Pembangunan daerah	KECAMATAN BUAHBATU	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	12 bulan	Rp -		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 19. 053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KECAMATAN BUAHBATU	Terbinanya Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	12 bulan	Rp -	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	KECAMATAN BUAHBATU	Terbinanya Jumlah partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	12 bulan	Rp -		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	% rata tingkat pemberdayaan masyarakat	75%	Rp 6.915.403.594	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	% rata tingkat pemberdayaan masyarakat	75%	Rp 6.915.403.594		
4.0 5. 4.0 5.3 1. 25. 001	Pemberdayaan Lingkup RW	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	12 bulan	Rp 5.499.950.148	Pemberdayaan Lingkup RW	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	12 bulan	Rp 5.499.950.148		



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.0 5.3 1.25.002	Pemberdayaan Lingkup PKK	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	12 bulan	Rp 399.999.954	Pemberdayaan Lingkup PKK	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	12 bulan	Rp 399.999.954
4.0 5.3 1.25.003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	12 bulan	Rp 361.209.864	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	12 bulan	Rp 361.209.864
4.0 5.3 1.25.004	Pemberdayaan Lingkup LPM	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	12 bulan	Rp 399.993.628	Pemberdayaan Lingkup LPM	KECAMATAN BUAHBATU	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	12 bulan	Rp 399.993.628
4.0 5.3 1.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	%Kejadian balita gizi buruk di kecamatan	58,33 %	Rp 254.250.000	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	%Kejadian balita gizi buruk di kecamatan	58,33%	Rp 254.250.000
TOTAL					Rp15.560.506.972					Rp 15.560.506.972



Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu Tahun 2019

2.5. PENELAAH USULAN PROGRAM KEGIATAN MASYARAKAT

Kebijakan belanja daerah Kota Bandung merupakan kebijakan yang diarahkan untuk mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang efisien, efektif dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Bandung khususnya di kewilayahan. Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi maka arah kebijakan belanja berdasarkan pada prioritas pembangunan Kota Bandung Tahun 2020.

Dengan berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah tahun 2020 disusun dengan pendekatan yang berbasis kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektifitas pengguna anggaran ke dalam program/kegiatan. Kebijakan belanja tahun 2020 diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan belanja terbagi atas kebijakan belanja langsung dan belanja tidak langsung.

Kebijakan belanja langsung meliputi sebagai berikut :

1. Penganggaran belanja langsung diprioritaskan untuk secara konsisten melaksanakan amanat perundangan dengan mengalokasikan anggaran untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat.
2. Penganggaran belanja langsung untuk penanggulangan kemiskinan serta peningkatan infrastruktur kota bagi

- pertumbuhan ekonomi untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi masyarakat.
3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya untuk memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
 4. Belanja untuk mengakomodir usulan musrenbang dan reses yang disampaikan melalui kegiatan *musrenbang* tingkat Kecamatan.
 5. Mengalokasikan belanja modal sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan fokus pada belanja modal berupa bangunan, jalan, jembatan, dan aset untuk menjamin APBD diarahkan untuk menambahkan nilai aset milik pemerintah kota.
 6. Mengalokasikan anggaran belanja langsung untuk kebutuhan pengawasan penyelenggaraan pemerintah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
 7. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam kegiatan pada masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan kompleksitas, besaran pagu anggaran dan jumlah personilnya.
 8. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi tiru dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud.
 9. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program/kegiatan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan pertimbangan utama manfaat bagi masyarakat atas pelaksanaan program/kegiatan.

10. Melakukan analisis mengenai kesesuaian output kegiatan dengan jenis belanja dengan cara mengunci pada aplikasi dimana akses terhadap jenis belanja hanya dibuka untuk komponen yang terkait dengan output yang dihasilkan, sehingga anggaran yang dialokasikan tepat sasaran dan efisien.

Kebijakan belanja tidak langsung meliputi sebagai berikut :

1. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji pokok dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Mengefektifkan alokasi dana hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah kepada kelompok masyarakat/lembaga yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk fisik dan non fisik.
3. Mengalokasikan belanja tidak terduga secara rasional, yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak bisa diperkirakan sebelumnya.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN-KEBIJAKAN NASIONAL

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 berdasarkan acuan kinerja yang terdapat dokumen RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019 - 2023.

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan prioritas ini adalah *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menjaring usulan prioritas pembangunan dengan memperhatikan beberapa kriteria, antara lain :

- a. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap NAWACITA, SDG's, Standar Pelayanan Minimal, program terkait pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, serta permasalahan pembangunan yang mendesak.
- b. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi, tujuan, sasaran kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD dan menjadi target kinerja yang harus dicapai pada tahun 2023.
- c. Korelasinya terhadap pengembangan sector/bidang terkait keunggulan kompetitif daerah.
- d. Korelasinya terhadap isu strategis daerah.



3.1.1 Penelaahan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2019-2023

Tema Rancangan Teknokratik RPJMD Tahun 2020-2024 adalah:

“Indonesia Berpenghasilan Menengah-Tinggi Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan”

1. Berpenghasilan menengah –tinggi dapat diwujudkan dengan:
 - Transformasi struktural berjalan
 - Produktifitas tenaga kerja meningkat
 - Iklim investasi kondusif
 - GNI per kapita USD 3.896 – USD 12.055
2. Sejahtera dapat diwujudkan dengan:
 - Kualitas hidup meningkat
 - Perilaku disiplin dan beradab
 - SDM berkualitas dan berdaya saing
 - Indeks kebahagiaan meningkat
3. Adil dapat diwujudkan dengan:
 - Ketimpangan menurun
 - Redistribusi berjalan baik
4. Berkesinambungan dapat diwujudkan dengan:
 - Memperhatikan daya dukung dan daya tampung (Low Carbon Development)



- Selaras dengan agenda pembangunan global dan nasional

Arah kebijakan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2019 -2023, adalah:

1. Pembangunan manusia
 - a. Pelayanan dasar dan perlindungan sosial
 - b. SDM berkualitas dan berdaya saing
2. Pembangunan ekonomi
 - a. Pangan dan pertanian
 - b. Energi, mineral, dan pertambangan
 - c. Kelautan dan kemaritiman
 - d. Pariwisata
 - e. Ekonomi kreatif dan digital
 - f. Industri manufaktur
3. Pembangunan infrastruktur
4. Pembangunan politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan
5. Pembangunan kewilayahan

Adapun isu strategis Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2019-2023, sebagai berikut:

1. Pembangunan Manusia:
 - Pelayanan Dasar
 - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
2. Pembangunan ekonomi:
 - Pangan
 - Energi
 - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital



- Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman
3. Pembangunan kewilayahan:
 - Sentra Pertumbuhan
 - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan
 4. Pembangunan Infrastruktur:
 - Transportasi
 - Telekomunikasi
 - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman
 5. Pembangunan Polhukkamhan:
 - Hukum dan Regulasi
 - Hankam
 - Politik

3.1.2 Penelaahan terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat

Penelaahan terhadap Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi.

Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat. Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat periode 2018-2023 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Berbagai kebijakan pembangunan jangka menengah Jawa Barat sampai dengan Tahun 2023 difokuskan untuk mewujudkan visi. Adapun visi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, adalah:



**“Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan
Inovasi dan Kolaborasi”**

Pernyataan visi Provinsi Jawa Barat 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut:

Jabar Juara Lahir Batin : pembangunan Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin.

Inovasi : pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan.

Kolaborasi : perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat 2018-2023, yaitu :

1. Membentuk Manusia Pancasila Yang Bertaqwa Melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah Sebagai Pusat Peradaban.
2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.



4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera Dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Perwujudan visi dan misi pembangunan Provinsi Jawa Barat berdasarkan pada nilai-nilai yang menjadi prinsip pembangunan. Tata nilai tersebut hidup dan menjadi jiwa bagi masyarakat Jawa Barat. Nilai pembangunan Jawa Barat 2018-2023, meliputi:

“Religijs - Bahagia - Adil - Inovatif - Kolaboratif”

Jabar Juara dicapai dengan menerapkan konsep pembangunan yang terdiri atas: Pro Perubahan; Pro Kesenjangan; Pro Ekonomi Umat dan Golongan Ekonomi Lemah (Golekmah); Pro Lingkungan dan Tata Ruang; dan Pro Pembangunan Berkelanjutan. Konsep pembangunan Jawa Barat 2018-2023 tersebut sejalan dengan konsep pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Pembangunan daerah diarahkan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Program unggulan gubernur dan wakil gubernur terpilih Jawa Barat merupakan hal-hal yang strategis dan untuk itu



perlu dikedepankan dalam upaya mencapai visi dan misi.

Program unggulan RINDU, meliputi:

1. Akses pendidikan untuk semua, meliputi:
 - a. Kelas pintar untuk semua
 - b. 1 Universitas di setiap kabupaten/kota
2. Desentralisasi pelayanan kesehatan, meliputi:
 - a. Layat rawat
 - b. Pembangunan dan perbaikan rumah sakit
 - c. Posyandu Juara
3. Pertumbuhan ekonomi umat berbasis inovasi, meliputi:
 - a. Ekonomi digital
 - b. Inkubator bisnis
 - c. Creative/Start-up hub
 - d. Gudang tani dan ikan Juara
 - e. Kredit 0%
4. Pengembangan destinasi dan infrastruktur pariwisata, meliputi:
 - a. 1 kabupaten/kota 1 destinasi wisata unggul
 - b. Infrastruktur pariwisata
 - c. Pengembangan SDM pariwisata
5. Pesantren juara, meliputi:
 - a. Modernisasi dana umat
 - b. Tunjangan santri dan ulama
 - c. Modernisasi manajemen pesantren
 - d. 1 pesantren 1 produk (trenmarket)
6. Insfrastruktur konektivitas wilayah, meliputi:
 - a. 100% jalan mulus di Jawa Barat
 - b. Pembangunan dan perbaikan jalan kereta



7. Gerakan bangun desa (Gerbang desa), meliputi:
 - a. 1 desa 1 Bumdes (OVOP)
 - b. Tunjangan desa
 - c. Irigasi pertanian desa
 - d. Internet masuk desa
8. Subsidi gratis golekmah, meliputi:
 - a. Rumah gratis
 - b. Transportasi gratis
 - c. Layanan kesehatan gratis
 - d. Pendidikan gratis
 - e. Sembako gratis
9. Inovasi pelayanan publik dan penataan daerah, meliputi:
 - a. Provinsi pintar (E-planning budgeting, E-money, E-remunerasi kinerja, dll)
 - b. Kota/desa pintar
 - c. Pemekaran wilayah

Penetapan isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal. Dengan mengerahkan segenap potensi dan peluang serta sumber daya yang ada untuk mencari solusi bagi permasalahan dan tantangan pembangunan, diharapkan dapat ditetapkan isu strategis yang berdaya ungkit bagi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat. Sehingga isu strategis pada Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat, adalah:

1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial



3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan
4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan
5. Reformasi Birokrasi

Telaahan dari RPJMN dan RPJMD Jawa Barat masih ada beberapa faktor yang menjadi menghambat dan mendorong pelayanan perangkat daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi Dan Misi Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah antara lain belum terpenuhinya kebutuhan SDM yang berkualitas dan berdaya saing yang ada di tingkat kewilayahan guna meningkatkan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat dan tersedianya anggaran untuk pembangunan kewilayahan yang semakin membaik dengan harapan dapat meningkatkan inovasi pembangunan dikewilayahan sesuai kebutuhan masyarakat.

3.1.3 Penelaahan RPJMD Tahun 2018-2023 (Misi 2 dan Misi 5)

Tujuan dan sasaran menjadi kebijakan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan kota. Tujuan adalah pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dapat dicapai, rasional, untuk dilaksanakan dalam jangka waktu 5(lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran pembangunan daerah mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan



pembangunan daerah. Selanjutnya, rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah menjadi landasan perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran rencana strategis perangkat daerah. Rencana strategis perangkat daerah harus selaras dan konsisten, termasuk Kecamatan Buahbatu sebagai perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran harus selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kota Bandung. Keselarasan hubungan antara misi, tujuan dan sasaran serta indikator Kecamatan Buahbatu dengan indikator RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023, dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Bersih

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1. Terlaksananya Reformasi Birokrasi yang Efektif dan Efisien	2.1 Indeks Reformasi Birokrasi	2.1.1 Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Birokrasi	2.1.1.1 Persentase Perangkat Daerah dengan Nilai IKM Baik
			2.1.1.2 Nilai Evaluasi AKIP Kota
			2.1.1.3 Nilai LPPD Kota
			2.1.1.4 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah
			2.1.1.5 Level Kematangan <i>Smart City</i> Kota Bandung



Dalam rangka pencapaian Misi 2, beberapa program dan kegiatan dilakukan menyesuaikan misi, tujuan dan sasaran di atasnya. Pencapaian misi yang telah diterjemahkan dalam tujuan dan sasaran dapat dilihat dari pencapaian indikator kerjanya. Beberapa variabel yang mempengaruhi pencapaian indikator kinerja dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam misi mewujudkan tatakelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien dan bersih adalah terlaksanakannya reformasi birokrasi yang efektif dan efisien yang dapat dilihat atau diukur dari pencapaian indeks reformasi birokrasi sebagai indikator kerjanya.

b. Sasaran

Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi pemerintahan yang baik atau *Good Governance* mengandung dua pemahaman yaitu :

- Nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan dalam pencapaian tujuan kemandirian daerah, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial.
- Aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun indikator yang menggambarkan pencapaian kinerja terkait meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi adalah persentasi perangkat daerah dengan nilai IKM Baik, nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau AKIP Kota Bandung, nilai LPPD Kota Bandung, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

Pemerintah Daerah.





Untuk mencapai target misi “ Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani, efektif, efisien, dan bersih “ diperlukan kerjasama antar perangkat daerah dalam bingkai perencanaan yang terintegrasi dalam sasaran dan programnya, yang dapat dilihat dalam gambar berikut.

Gambar 3.4.3



Misi 5 : Mengembangkan Pembiayaan Kota yang Partisipatif, Kolaboratif, dan Terintegrasi

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
5. Optimalisasi Partisipasi dan Kolaborasi dalam Pembangunan	5.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan Swasta dalam Pembangunan	5.1.1 Meningkatnya Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan dalam Pembangunan	5.1.1.1 Tingkat Partisipasi dan Kolaborasi Masyarakat dan dalam Pembangunan
		5.1.2 Meningkatnya Infrastruktur Kota Terpadu dan Berkualitas	5.1.2.1 Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari TJSL dan Sumbangan Pihak Ketiga
			5.1.2.2 Persentase Realisasi Program/Agenda Prioritas Pembangunan yang Dibiayai dari Swasta (Akumulasi)

Dalam pencapaian Misi 5, tujuan yang ingin dicapai dalam misi mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi adalah optimalisasi partisipasi dan kolaborasi dalam pembangunan yang dapat dilihat atau diukur dari tingkat pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagai indikator kinerjanya dengan sasaran kegiatan dalam pemberdayaan Lingkup RW dan lingkup LKK.

3.1.4 Penelaahan Rancangan KLHS

Penelaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah



(RPJMD) dilaksanakan secara bersama-sama yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Pemerintah daerah menyusun RPJMD adalah dengan memperhatikan prinsip dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG'S) yaitu untuk menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta generasi masa depan. Maka dalam penyusunan RPJMD dibutuhkan KLHS sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dan sebagai bahan masukan bagi Kebijakan, Rencana, Program (KRP) dalam penyusunan RPJMD Kota Bandung Tahun 2018-2023, sehingga dampak dan/atau risiko lingkungan dapat diminimalkan dengan memberikan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau program yang menimbulkan dampak dan/atau resiko negatif terhadap lingkungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Aspek pembangunan berkelanjutan mengusung 4 pilar yaitu: aspek lingkungan hidup, sosial, ekonomi dan hukum serta tata kelola. Keempat pilar pembangunan tersebut dijelaskan kedalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goal's (SDG's).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disebutkan bahwa Tujuan Pembangunan



Berkelanjutan/Sustainable Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global tahun 2016 sampai tahun 2030, yang mencakup 17 aspek kehidupan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015.

Dasar hukum dari KLHS RPJMD adalah Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan ke dalam dokumen RPJMD. KLHS RPJMD yang disusun sebelum dirumuskannya RPJMD difokuskan pada pencapaian target TPB dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola. Permendagri Nomor 7 Tahun 2018 ini bertujuan untuk memandu pemerintah daerah dalam merumuskan skenario pencapaian 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan 319 indikatornya, yang selanjutnya akan menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD, sehingga diharapkan akan terwujud pembangunan daerah yang mensejahterakan, dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan pembangunan serta keberlangsungan lingkungan hidup.

Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2018, meliputi:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan



3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan
6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
7. Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk semua
8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua
9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi
10. Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarneagra
11. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
13. Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya
14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
15. Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati



16. Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan dihimpun melalui masukan dan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik untuk mengkaji capaian indikator TPB di Kota/Kabupaten. Hasil konsultasi publik memuat 14 isu/permasalahan pembangunan di Kota Bandung berdasarkan hasil penapisan, yaitu meliputi:

1. Pengelolaan sampah yang belum optimal;
2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi;
3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan;
4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air;
5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis;
6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung;
7. Tingginya tingkat kemacetan;
8. Belum terpenuhinya RTH secara kuantitas dan kualitas;
9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung;
10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya local;



11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan;
12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar;
13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan;
14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik.

3.1.2. Isu-Isu Strategis Pembangunan Jangka Menengah Kecamatan Buahbatu

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Bertolak dari penelaahan terhadap isu tata ruang wilayah Kota Bandung serta permasalahan pembangunan di Kota Bandung, maka ditetapkan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah Kecamatan Buahbatu Kota Bandung sebagai berikut:



Tabel 3.5

Isu-isu Strategis

Isu Strategis Nasional	Isu Strategis Provinsi	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Kota Bandung	Isu Strategis Kecamatan Buahbatu
1. Pembangunan Manusia : - Pelayanan Dasar - SDM Berkualitas dan Berdaya Saing 2. Pembangunan ekonomi: - Pangan - Energi - Pariwisata, ekonomi Kreatif dan Digital - Industri Manufaktur Kelautan dan Kemaritiman 3. Pembangunan kewilayahan: - Sentra Pertumbuhan - Komoditas Unggulan Daerah Pertumbuhan Perkotaan 4. Pembangunan Infrastruktur: - Transportasi - Telekomunikasi - Sumber Daya Air Perumahan dan Pemukiman 5. Pembangunan	1. Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia 2. Kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial 3. Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan 4. Produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan 5. Reformasi Birokrasi	1. Pengelolaan sampah yang belum optimal 2. Penurunan Kualitas Air Permukaan/Sungai akibat sampah, limbah dan sedimentasi 3. Tingginya tingkat alih fungsi lahan dan Intensitas pemanfaatan ruang yang melebihi DDDT lingkungan 4. Frekuensi dan Intensitas Banjir semakin tinggi disebabkan oleh rendahnya tingkat resapan jalur hijau dan kondisi drainase serta badan air 5. Kondisi Muka Air Tanah di Kota Bandung kritis 6. Meningkatnya resiko kebakaran dan bencana lain di Kota Bandung 7. Tingginya tingkat kemacetan 8. Belum terpenuhinya RTH	1. Pembangunan Modal Sosial 2. Pemerataan Aksesibilitas dan Mutu Pendidikan 3. Peningkatan Derajat Masyarakat 4. Tata Kelola Pemerintahan 5. Ketimpangan ekonomi 6. Optimalisasi Infrastruktur dan pengendalian penataan ruang 7. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Optimalisasi pengelolaan persampahan 8. Penanggulangan Kemiskinan dan PMKS 9. Sinergitas Pembiayaan Pembangunan	1. Standar Pelayanan Kewilayahan 2. Peran Kelembagaan Masyarakat 3. Optimalisasi Pemberdayaan Kewilayahan





<p>Polhukkamhan :</p> <ul style="list-style-type: none">- Hukum dan Regulasi- Hankam- Politik		<p>secara kuantitas dan kualitas</p> <ol style="list-style-type: none">9. Belum optimalnya pengelolaan terhadap PKL di Kota Bandung10. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya dan budaya lokal11. Meningkatnya jumlah penduduk miskin dan pengangguran di perkotaan12. Belum optimalnya pengelolaan di tingkat pendidikan dasar13. Belum optimalnya penyediaan pelayanan kesehatan14. Minimnya kemitraan antara masyarakat sipil, pemerintahan dan swasta dalam mengakses pelayanan publik		
---	--	--	--	--



SEMANGAT BERSAMA SAMA MELAKUKAN



Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu Tahun 2019

PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja pembangunan secara keseluruhan.

Tujuan stratejik merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan diformulasikan tujuan stratejik ini, maka Pemerintah Kecamatan Buahbatu dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan stratejik ini memungkinkan Pemerintah Kecamatan Buahbatu mengukur sejauhmana visi dan misi organisasi telah dicapai. Untuk itu agar dapat tujuan stratejik yang ditetapkan harus memiliki indikator kinerja (*performance indikator*) yang terukur.

Sasaran Kecamatan Buahbatu Kota Bandung merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang ditetapkan dan dialokasikan secara periodik setiap tahun melalui serangkaian program dimana penetapannya diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Semua tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan strategi yang tepat, adapun tujuan yang akan dicapai untuk mewujudkan 1 (satu) misi ke-2, Kecamatan Buahbatu Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran, tujuan dan sasaran pada masing-masing misi adalah sebagai berikut :

Tujuan 1 :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Nilai Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu

Indikator Sasaran :

- Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu

Sasaran 2 :

Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Indikator Sasaran :

- Persentase Kelurahan Unggul

Tujuan 2 :

Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat;

Indikator Tujuan :

“Tingkat dukungan dan Pemberdayaan Masyarakat kepada program pemerintah dalam pembangunan kewilayahan”

Sasaran 1 :

Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat

Indikator Sasaran :

- Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bandung Tahun 2020 diturunkan berdasarkan misi pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2018 – 2023 yang masih relevan dengan perkembangan serta target RPJPD pada period eke IV. Adapun uraian tujuan dan sasaran yang digunakan sebagai dasar perumusan isu strategis serta prioritas pembangunan pada RKPD Kota Bandung Tahun 2020 khususnya perangkat daerah di wilayah Kecamatan Buahbatu dapat dilihat di bawah ini sebagai berikut :

Penjabaran Tujuan dan Sasaran Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Buahbatu Kota Bandung Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal 2018	Target Kinerja Sasaran 2019	Target Akhir Kinerja Sasaran 2023
1	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan Buahbatu	Rata-rata Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Buahbatu	Nilai	80	75	84
			Persentase temuan BPK an Inspektorat yang ditindak lanjuti tepat waktu	%	100	100	100
		Meningkatnya Peran Kelembagaan, Masyarakat dalam Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase Kelurahan Unggul	%	N/A	50,00	100,00
2	Optimalisasi Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	83	76,00	80,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen rencana tahunan memuat program dan kegiatan yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan, yang disajikan dalam bentuk rencana program dan kegiatan prioritas yang dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Proses penyusunan program dan kegiatan prioritas dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, partisipatif, bottom up, top-down, dan politis serta unsur inovatif sehingga diperoleh hasil yang akuntabel dan bermanfaat bagi masyarakat Kota Bandung.

1. Pendekatan teknokratis dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 berarti bahwa RKPD memuat metode dan kerangka berpikir ilmiah serta sistematis dalam melakukan analisis masalah. Dalam pendekatan teknokratis ini dilakukan pelibatan akademis yang berfungsi sebagai narasumber, serta pelibatan fungsional perencana yang berfungsi sebagai tim pelaksana penyusunan RKPD. Pada tahap ini dilakukan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menentukan isu strategis sebagai dasar penentuan prioritas pembangunan tahun 2019.
2. Pendekatan partisipatif dan bottom-up dalam penyusunan RKPD Tahun 2019 dilakukan melalui :
 - a. Pelaksanaan musrenbang RKPD yang berkualitas;
 - b. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan, dilakukan melalui *e-musrenbang*, sehingga

- masyarakat dapat memantau proses perencanaan pembangunan secara *real time*;
- c. Keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat, terutama kaum perempuan dan kelompok marjinal;
 - d. Pelibatan seluruh pemangku kepentingan pembangunan Kota Bandung;
 - e. Pelibatan secara aktif warga dalam forum Rembug Warga untuk menyepakati usulan yang akan disampaikan melalui aplikasi e-musrenbang pada forum Musrenbang Kelurahan.
3. Pendekatan *top-down* yang dilaksanakan dalam penyusunan RKPD tahun 2019 dijalankan melalui penyusunan rencana kerja yang sinergi dengan agenda dan prioritas pembangunan nasional yang tercantum dalam RKP Tahun 2019, sinergi dan konsisten dengan RPJMD maupun RPJPD, serta sinergi dan komitmen terhadap tujuan global, seperti SDG's (*Sustainable Development Goals*) dan pemenuhan SPM (*Standar Pelayanan Minimal*).
 4. Pendekatan politis pada prinsipnya memandang bahwa proses penyusunan rencana kerja harus mengedapankan kehendak dan kepentingan politis, diantaranya dilakukan melalui :
 - a. Konsultasi dengan kepala daerah untuk penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program kepala daerah.
 - b. Keterlibatan aktif DPRD dalam proses penyusunan rencana diantaranya dalam bentuk pokok-pokok pikiran DPRD maupun reses anggota DPRD.

Ringkasan anggaran perangkat daerah yang tertuang di dalam RKPD bersifat indikatif, dalam artian bahwa seluruh data

dan informasi baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen RKPD merupakan indikasi yang hendak dicapai. Ringkasan anggaran yang tertuang dalam RKPD ini untuk selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Tahun 2019.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2019 merupakan rekapitulasi dari hasil Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 yang disusun dengan menggunakan matrik program dan kegiatan perangkat daerah, sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai :

- Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan;
- Indikator kinerja;
- Lokasi Kegiatan;
- Target Kinerja Capaian Program;
- Besaran Dana yang Dibutuhkan;
- Target Kinerja Capaian Program/Kegiatan.

Penjelasan lebih rinci terkait dengan rumusan rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam hal ini Pemerintahan Kecamatan Buahbatu pada Tahun 2019 disertai dengan Prakiraan Maju Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini sebagai berikut :



Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kota Bandung

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN BUAHBATU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator	Rencana Tahun 2019 (tahun rencana)						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Kinerja Program /Kegiatan	Lokasi	target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/ pagu indikatif	Jumlah Anggaran yang sudah di input di SIRA	Persentase Input SIRA		Sumber Dana	target capaian kinerja
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.05.4.05.31.01	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 2.394.456.936	Rp 2.394.456.936	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 2.633.902.630
4.05.4.05.31.01.02	Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah kegiatan pembayaran jasa komunikasi, air dan listrik	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 198.555.572	Rp 198.555.572	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 218.411.129
4.05.4.05.31.01.03	Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa peralatan dan perlengkapan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 12.561.500	Rp 12.561.500	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 13.817.650
4.05.4.05.31.01.06	Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	jumlah kegiatan pembayaran jasa perijinan kendaraan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 62.133.000	Rp 62.133.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 68.346.300
4.05.4.05.31.01.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah kegiatan pembayaran jasa kebersihan kantor	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 186.960.000	Rp 186.960.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 205.656.000



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.05 . 4.05.31 . 01 . 09	Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah kegiatan jasa perbaikan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 79.770.000	Rp 79.770.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 87.747.000
4.05 . 4.05.31 . 01 . 10	Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan ATK	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 159.984.184	Rp 159.984.184	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 175.982.602
4.05 . 4.05.31 . 01 . 11	Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah kegiatan pengadaan cetakan dan pengadaan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 141.588.450	Rp 141.588.450	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 155.747.295
4.05 . 4.05.31.01.12	Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan komponen instalasi listrik/ penerangan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 39.749.680	Rp 39.749.680	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 43.724.648
4.05 . 4.05.31 . 01 . 13	Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan dan perlengkapan Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 289.615.578	Rp 289.615.578	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 318.577.136
4.05 . 4.05.31 . 01 . 14	Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah kegiatan pengadaan peralatan rumah tangga	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 60.227.200	Rp 60.227.200	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 66.249.920
4.05 . 4.05.31 . 01 . 15	Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah kegiatan penyediaan bahan bacaan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 36.321.172	Rp 36.321.172	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 39.953.289
4.05 . 4.05.31 . 01 . 17	Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah kegiatan penyediaan makanan dan minuman	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 292.990.600	Rp 292.990.600	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 322.289.660
4.05 . 4.05.31 . 01 . 18	Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi keluar daerah	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 180.000.000	Rp 180.000.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 198.000.000
4.05 . 4.05.31.01.19	Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/ Teknis Perkantoran	Jumlah Kegiatan Jasa Tenaga Pendukung	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 544.200.000	Rp 544.200.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 598.620.000
4.05 . 4.05.31.01.20	Kegiatan Penyediaan jasa pengamanan kantor	Jumlah kegiatan jasa pengamanan kantor	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 109.800.000	Rp 109.800.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 120.780.000





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.05.4.05.31.02	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		KECAMATAN BUAHBATU	100%	Rp 814.097.113	Rp 814.097.113	100,00%	APBD		100%	Rp 895.506.824
4.05.4.05.31.02.06	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas	Jumlah sub kegiatan pengadaan kendaraan dinas	KECAMATAN BUAHBATU	1 tahun	Rp 158.703.065	Rp 158.703.065	0,00%	APBD		1 tahun	Rp 174.573.372
4.05.4.05.31.02.07	Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah sub kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor	KECAMATAN BUAHBATU	1 tahun	Rp -	Rp -	0,00%	APBD		1 tahun	Rp -
4.05.4.05.31.02.22	Kegiatan Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas	Jumlah pengadaan Dekorasi Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	1 paket	Rp 74.800.000	Rp 74.800.000	100,00%	APBD		1 paket	Rp 82.280.000
4.05.4.05.31.02.24	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang di pelihara	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 120.650.048	Rp 120.650.048	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 132.715.053
4.05.4.05.31.02.42	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara	KECAMATAN BUAHBATU	1 tahun	Rp 459.944.000	Rp 459.944.000	100,00%	APBD		1 tahun	Rp 505.938.400
4.05.4.05.31.02.52	Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor	KECAMATAN BUAHBATU	1 tahun	Rp -	Rp -	0,00%	APBD		1 tahun	Rp -
4.05.4.05.31.03	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR		KECAMATAN BUAHBATU	1 paket	Rp 182.940.000	Rp 182.940.000	100,00%	APBD		1 paket	Rp 201.234.000
4.05.4.05.31.03.02	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	KECAMATAN BUAHBATU	1 paket	Rp 31.250.000	Rp 31.250.000	100,00%	APBD		1 paket	Rp 34.375.000
4.05.4.05.31.03.05	Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus/ Hari-hari tertentu	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	KECAMATAN BUAHBATU	1 paket	Rp 151.690.000	Rp 151.690.000	100,00%	APBD		1 paket	Rp 166.859.000
4.05.4.05.31.03.06	Kegiatan Pengadaan Pakaian KORPRI	Jumlah sub kegiatan pengadaan pakaian KORPRI	KECAMATAN BUAHBATU	1 paket	Rp -	Rp -	0,00%	APBD		1 paket	Rp -
4.05.4.05.31.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 172.500.000	Rp 172.500.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 189.750.000
4.05.4.05.31.25.004	Pembinaan Kinerja Aparatur	Jumlah pegawai yang mendapatkan pembinaan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 172.500.000	Rp 172.500.000	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 189.750.000





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

											Rp -
4.05.4.05.31.25	Program Pemberdayaan KUMKM	(% UMKM yang meningkat kemampuan usahanya)	KECAMATAN BUAHBATU	50%	Rp 30.597.750	Rp 30.597.750	100,00%	APBD	50%	Rp 33.657.525	
4.05.4.05.31.25.001	Kegiatan Pemberdayaan KUMKM kewilayahan	Jumlah KUMKM aktif di wilayah kecamatan/kelurahan	KECAMATAN BUAHBATU	50%	Rp 30.597.750	Rp 30.597.750	100,00%	APBD	50%	Rp 33.657.525	
4.05.4.05.31.25	Program Pelayanan Pemberdayaan Kewilayahan	% Posyandu mandiri tingkat Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	58,33%	Rp 94.800.000	Rp 94.800.000	100,00%	APBD	58,33%	Rp 104.280.000	
4.05.4.05.31.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya Masyarakat	% Kejadian balita Gizi Buruk Balita di Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	58,33%	Rp 94.800.000	Rp 94.800.000	100,00%	APBD	58,33%	Rp 104.280.000	
		Jml Kader Posyandu dan Pokjanel Posyandu Aktif	KECAMATAN BUAHBATU								
4.05.4.05.31.33	Program Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang ikut berperan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	KECAMATAN BUAHBATU	75%	Rp 62.250.000	Rp 62.250.000	100,00%	APBD	75%	Rp 68.475.000	
4.05.4.05.31.33.005	Kegiatan Peningkatan SDM Kader Kesejahteraan Sosial Kecamatan	jml kader/ lembaga yang mengikuti lomba tingkat kota	KECAMATAN BUAHBATU		Rp 62.250.000	Rp 62.250.000	100,00%	APBD		Rp 68.475.000	
4.05.4.05.31.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	% Rata rata RW Yang memiliki Siskamling Aktif dan Relawan Bencana	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 997.275.300	Rp 997.275.300	100,00%	APBD	12 bulan	Rp 1.097.002.830	
4.05.4.05.31.15.005	Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan	% konflik yang ditindaklanjuti/fasilitasi	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 997.275.300	Rp 997.275.300	100,00%	APBD	12 bulan	Rp 1.097.002.830	
4.05.4.05.31.42	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sarana Fasilitas Umum	Kerb dan Drainase kewilayahan Terpelihara	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 2.174.489.686	Rp 2.174.489.686	100,00%	APBD	12 bulan	Rp 2.391.938.655	





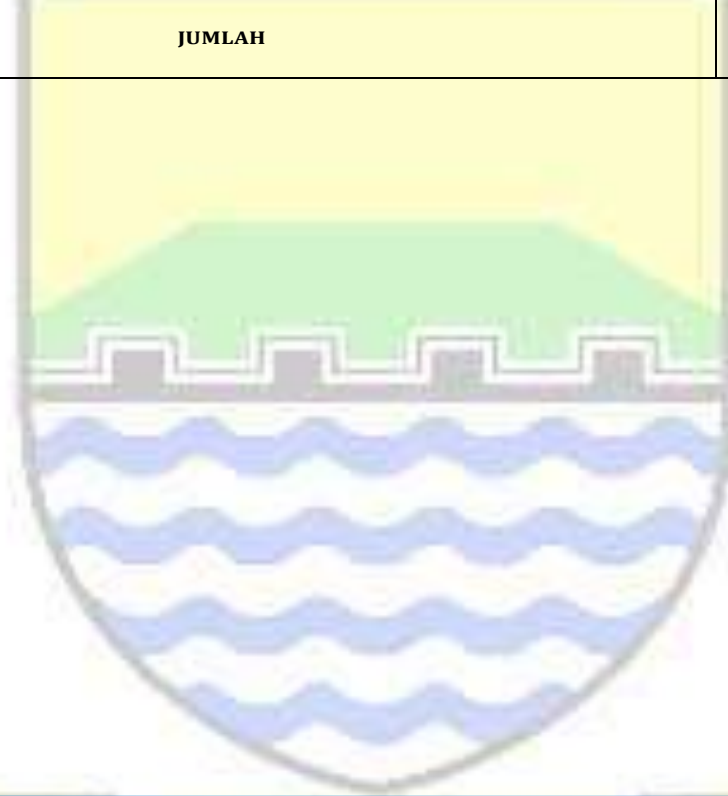
4.05.4.05.31.42.014	Kegiatan Pemeliharaan Drainase dan Kebersihan Lingkungan	Luasan Drainase kelurahan/kecamatan terpelihara	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 1.446.521.150	Rp 1.446.521.150	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 1.591.173.265
4.05.4.05.31.42.015	Pemeliharaan RTH Kecamatan	Luasan RTH kecamatan terpelihara	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 246.194.936	Rp 246.194.936	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 270.814.430
4.05.4.05.31.42.016	Kegiatan Pengecatan Kerb bahu jalan	Kerb Jalan Terpelihara	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 481.773.600	Rp 481.773.600	0,00%	APBD		12 bulan	Rp 529.950.960
4.05.4.05.31.20	Program Pengadministrasi Pelayanan Kependudukan dan Pemerintahan	Rata rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	KECAMATAN BUAHBATU	84	Rp 1.721.696.593	Rp 1.721.696.593	100,00%	APBD		84	Rp 1.893.866.252
4.05.4.05.31.20.001	Kegiatan Peningkatan kualitas Pelayanan Administrasi dan Kependudukan kewilayahan	IKM Kecamatan/ kelurahan per triwulan	KECAMATAN BUAHBATU	84	Rp 28.496.593	Rp 28.496.593	100,00%	APBD		84	Rp 31.346.252
4.05.4.05.31.20.002	Kegiatan Pembinaan RT RW	jumlah RW RT yang mendapatkan Pembinaan	KECAMATAN BUAHBATU	55 RT/RW	Rp 1.693.200.000	Rp 1.693.200.000	100,00%	APBD		55 RT/RW	Rp 1.862.520.000
4.05.4.05.31.19	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan			0,00%	APBD		12 bulan	Rp -
4.05.4.05.31.19.053	Kegiatan Penyelenggaraan Musrenbang RKPd	Terbinanya Jumlah partisipan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan			0,00%	APBD		12 bulan	Rp -
4.05.4.05.31.25	Program Pemberdayaan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	% rata tingkat pemberdayaan masyarakat	KECAMATAN BUAHBATU	75%	Rp 6.915.403.594		100,00%	APBD		75%	Rp 6.700.000.000
4.05.4.05.31.25.001	Pemberdayaan Lingkup RW	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup RW	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 5.499.950.148	Rp 5.499.950.148	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 5.500.000.000





PEMERINTAH KOTA BANDUNG
KECAMATAN BUAHBATU

4.05.4.05.31.25.002	Pemberdayaan Lingkup PKK	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup PKK	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 399.999.954	Rp 399.999.954	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 400.000.000
4.05.4.05.31.25.003	Pemberdayaan Lingkup Karang Taruna	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup Karang Taruna	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 361.209.864	Rp 361.209.864	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 400.000.000
4.05.4.05.31.25.004	Pemberdayaan Lingkup LPM	jumlah sub kegiatan pemberdayaan lingkup LPM	KECAMATAN BUAHBATU	12 bulan	Rp 399.993.628	Rp 399.993.628	100,00%	APBD		12 bulan	Rp 400.000.000
4.05.4.05.31.25.005	Kegiatan Penguatan Kelembagaan Swadaya masyarakat	%Kejadian balita gizi buruk di kecamatan	KECAMATAN BUAHBATU	58,33%	Rp 254.250.000	Rp 254.250.000	100,00%	APBD		58.33%	Rp 100.000.000
JUMLAH					Rp 15.560.506.972	Rp 15.560.506.972	100,00%				Rp 16.209.613.716



BAB V P E N U T U P

Rencana Kerja Kecamatan Buahbatu merupakan pedoman taktis strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan publik di wilayah Kecamatan Buahbatu yang akan dilaksanakan pada tahun 2020.

Program-program dan indikasi kegiatan-kegiatan yang tercantum dalam Renja ini tidak hanya menjabarkan rencana kegiatan yang diakomodasi secara swakelola baik yang di dani dari DPA Kecamatan maupun Dinas Instansi terkait tingkat Kota, juga menjabarkan Prioritas Program dan Kegiatan pada tahun 2020 yang tidak dapat di akomodasikan dengan DPA Kecamatan.

Permasalahan utama dalam melaksanakan peningkatan kinerja di Kecamatan Buahbatu adalah sebagai berikut :

- a. Kualitas SDM yang ada masih belum optimal dari standar ideal aparatur pelayanan publik, sehingga sulit untuk mencari personil yang kopentensi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya;
- b. Sarana dan prasarana kantor Kecamatan Buahbatu masih kurang memadai, baik berupa tata ruang gedung dan peralatan penunjangnya;
- c. Terbatasnya anggaran yang dikelola oleh kecamatan sedangkan kebutuhan operasional, pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan pembangunan memerlukan dana sangat besar;

- d. Jangka waktu proses pencairan dana belum sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan sehingga mengganggu kelancaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan;

Upaya pemecahan masalah sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut :

- 1) Di samping segi kualitas yang masih kurang, kualitas yang ada juga masih belum optimal dari standar ideal public service. Upaya yang ditempuh kecamatan untuk mengatasi adalah dengan anggaran yang ada mengadakan pelatihan-pelatihan aplikasi sesuai kebutuhan dan pengiriman personil ke diklat-diklat tingkat Kota Bandung sebagai upaya meningkatkan mutu SDM;
- 2) Sarana dan prasarana kantor kecamatan masih kurang memadai, upaya yang dilaksanakan adalah mengajukan usulan pembangunan kembali bangunan fisik kantor agar ideal sebagai sarana melaksanakan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Jumlah anggaran yang terbatas, maka kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan disaring sesuai dengan prioritas dan kemanfaatannya bagi aparatur kecamatan maupun

Rencana Kerja SKPD Kecamatan Buahbatu Tahun 2019 merupakan dokumen perencanaan kecamatan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung 2005-2025 yang memuat Visi Kota Bandung yaitu mewujudkan ***Kota Bandung sebagai***



Kota Jasa yang BERMARTABAT (Bersih, Makmur, Taat, dan Bersahabat).

Rencana Kerja ini berupaya secara maksimal untuk menjabarkan dari pencapaian Visi Kota Bandung serta mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan pada pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari tingkat kelurahan sampai kecamatan.

Namun sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kota Bandung, berdasarkan realisasi perencanaan pembangunan tahunan yang lalu, perencanaan pembangunan yang dibiayai APBD Kota Bandung masih sangat terbatas sehingga banyak aspirasi masyarakat yang merupakan prioritas permasalahan yang dihadapi masyarakat belum terakomodir melalui APBD Kota Bandung.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, kami mencoba mengelompokan antara rencana pembangunan yang murni didanai swadaya masyarakat, diajukan melalui DPA Kecamatan sesuai kewenangan yang ada dan diajukan kepada dinas, badan, lembaga tingkat Kota Bandung sesuai tupoksi masing-masing.

Oleh karena itu kami mengusulkan untuk Tahun Anggaran 2019, Kebijakan Umum Anggaran (KUA) untuk kecamatan diharapkan sebanyak mungkin memenuhi aspirasi masyarakat khususnya yang menjadi prioritas pembangunan, yang akan berdampak terhadap kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintah Kota Bandung.

Kami berupaya dalam penyusunan Rencana Kerja ini berdasarkan kepada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui mekanisme Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan.



Demikianlah Rencana Kerja SKPD Kecamatan Buahbatu Tahun 2019 kami susun, semoga menjadi bahan kebijakan bagi Pemerintah Kota Bandung dalam Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 dan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Buahbatu Tahun 2019.

Bandung, Juli 2019



KECAMATAN BUAHBATU

Drs. DENNY SANY, M.Si

NIP. 19650810 198603 1 024

